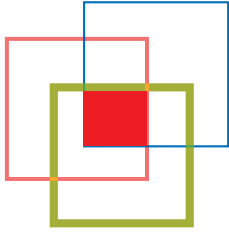




International
Labour
Organization

Program ILO di Indonesia: **Capaian 2016**



International
Labour
Organization

Program ILO di Indonesia: **Capaian 2016**

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

Program ILO di Indonesia: Capaian 2016/Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2017
66 p.

ISBN: 978-92-2-031095-3 (print)
978-92-2-130673-3 (web pdf)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ILO Works in Indonesia: 2016 Results*; ISBN: 978-92-2-031095-3 (print); 978-92-2-130673-3 (web pdf) Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2017

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org.

Foto-foto: Koleksi Kantor ILO Jakarta

Editor: Gita F. Lingga

Dicetak di Indonesia

Kata Pengantar



Merupakan kebanggaan kami dapat menghadirkan laporan capaian tahunan kelima yang memaparkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Indonesia. Publikasi ini memaparkan capaian-capaian kami untuk tahun 2016 yang produktif. Kami terdorong untuk melanjutkan prakarsa ini, menampilkan program dan kegiatan kongkrit di Indonesia dan memperlihatkan dukungan besar yang diberikan oleh para mitra tripartit kami.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Organisasi ini memiliki 187 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya mengingat struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Indonesia telah menjadi anggota ILO yang sangat aktif dan penting sejak tahun 1950.

Capaian-capaian tahun 2016 ini berdasarkan tiga prioritas utama Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia (2012-2015):

1. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan
2. Hubungan industrial yang harmonis dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif
3. Perlindungan sosial untuk semua

Kami saat ini sedang dalam proses mengidentifikasi prioritas-prioritas baru dan mengembangkan generasi ketiga Program Pekerjaan Layak Nasional, yang akan memberikan panduan yang koheren dan terpadu terhadap kegiatan-kegiatan ILO di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Terbitan Program ILO tahun 2016 kali ini memaparkan beragam capaian di bawah program-program dan proyek-proyek ILO di Indonesia. Capaian-capaian tersebut meliputi, di antaranya, peningkatan dan perbaikan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah, kepatuhan perusahaan terhadap standar-standar ketenagakerjaan, peluang kerja yang lebih setara bagi penyandang disabilitas, pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja, pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat, dinamika hubungan industrial, dan perluasan cakupan perlindungan sosial.

Capaian-capaian tahun 2016 ini pun merupakan hasil dari kemitraan erat dengan para konstituen tripartit kami. Kami terus menjalin kerjasama dengan mereka pada 2017.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kami atas dukungan yang kami terima dari berbagai mitra, yang tanpa mereka kami tidak akan mungkin mencapai hasil-hasil ini. Juga penghargaan kepada tim ILO di Indonesia, di regional dan kantor pusat atas kinerja dan dedikasi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan kami di Indonesia, saya mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami: www.ilo.org/jakarta.

Selamat membaca!



Francesco d'Ovidio

Direktur ILO di Indonesia

Pekerjaan Layak untuk Semua

Pekerjaan merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak. Pekerjaan layak merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Ia melibatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang produktif dan memperoleh penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga mereka.

Pekerjaan layak berarti prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membutuhkan adanya kesetaraan peluang dan perlakuan bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan layak pun merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Karenanya, penciptaan pekerjaan layak harus dimasukkan dalam kebijakan pembangunan.

Daftar Isi

	Kata Pengantar	3
	Daftar Isi	5
	Sekilas Indonesia	9
	A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	12
	1. Kebijakan ketenagakerjaan	
	2. Ketenagakerjaan muda	
	3. Pengoptimalan ketenagakerjaan dalam investasi masyarakat	
	♦ Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur	23
	4. Pengembangan wirausaha dan bisnis	
	♦ Program Kesenambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)	13
	♦ Proyek Perluasan Kesempatan Kerja melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Wirausaha dan Akses terhadap Keuangan (PROMISE IMPACT)	17
	♦ Program Bantuan Pemulihan Gunung Sinabung (SIRESUP)	20
	B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif	26
	♦ Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global – Tahap II	27
	♦ Program Bagi Pengusaha dan Pekerja	30
	♦ Better Work Indonesia	34
	♦ Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif (InSIGHT)	37
	C. Perlindungan sosial untuk semua	40
	♦ Memperluas Cakupan Jaminan Sosial di ASEAN	41
	♦ Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD) – Tahap II	43
	♦ Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangundangan (PROPEL-Indonesia)	46
	♦ Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja	50
	♦ Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)	52
	♦ PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak	54
	Tema lintas sektor	58
	1. Persamaan gender	
	♦ Program Gender, Non-Diskriminasi dan Kesenjangan	59

Bagaimana ILO Bekerja

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 187 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program, ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Badan Pemimpin ILO (Governing Body), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap tahun di Jenewa. Konferensi ini menyusun dan mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan dan merupakan forum diskusi berbagai permasalahan sosial dan ketenagakerjaan. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, diwakili delegasi yang terdiri dari dua perwakilan pemerintah, masing-masing seorang perwakilan pekerja dan pengusaha, serta para penasihat teknis mereka. Mereka dapat memberikan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

ILO di Indonesia: Prioritas dan Keluaran

Indonesia dan ILO telah menjalin kerjasama sejak Indonesia menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Menerapkan struktur tripartit yang unik, ILO membangun kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan empat konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kongres Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Berdasarkan prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia, mandat ILO dan fokus para konstituen tripartit, tiga bidang prioritas telah ditetapkan untuk Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia (DWCP) 2012-2015. Indonesia saat ini sedang menyusun DWCP baru untuk lima tahun ke depan.

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.

B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.

C. Jaminan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripartisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diarusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Sekilas Indonesia

POPULASI

256.000.307

49,75% 

50,25% 

AREA

1.910.931,32 km²

Pulau: **17,504**

Kepadatan: **132** orang/km²

ADMINISTRASI

34 provinsi

416 kabupaten

98 kota

189.1 

Penduduk yang
bekerja (dalam 000)

125.4 

Penduduk aktif
secara ekonomi
(dalam 000)

118.4 

Total
ketenagakerjaan
(dalam 000)

7.0 

Total pengangguran
(dalam 000)

Statistik Utama (2016)

66,3% 

Tingkat partisipasi
angkatan kerja

62,6% 

Rasio tenaga kerja
atas penduduk

9,0% 

Tingkat setengah
pengangguran

5,6% 

Tingkat pengangguran

34,2% 

Tingkat ketidakaktifan

Kegiatan

PROYEK:



PROGRAM:



Didukung oleh:



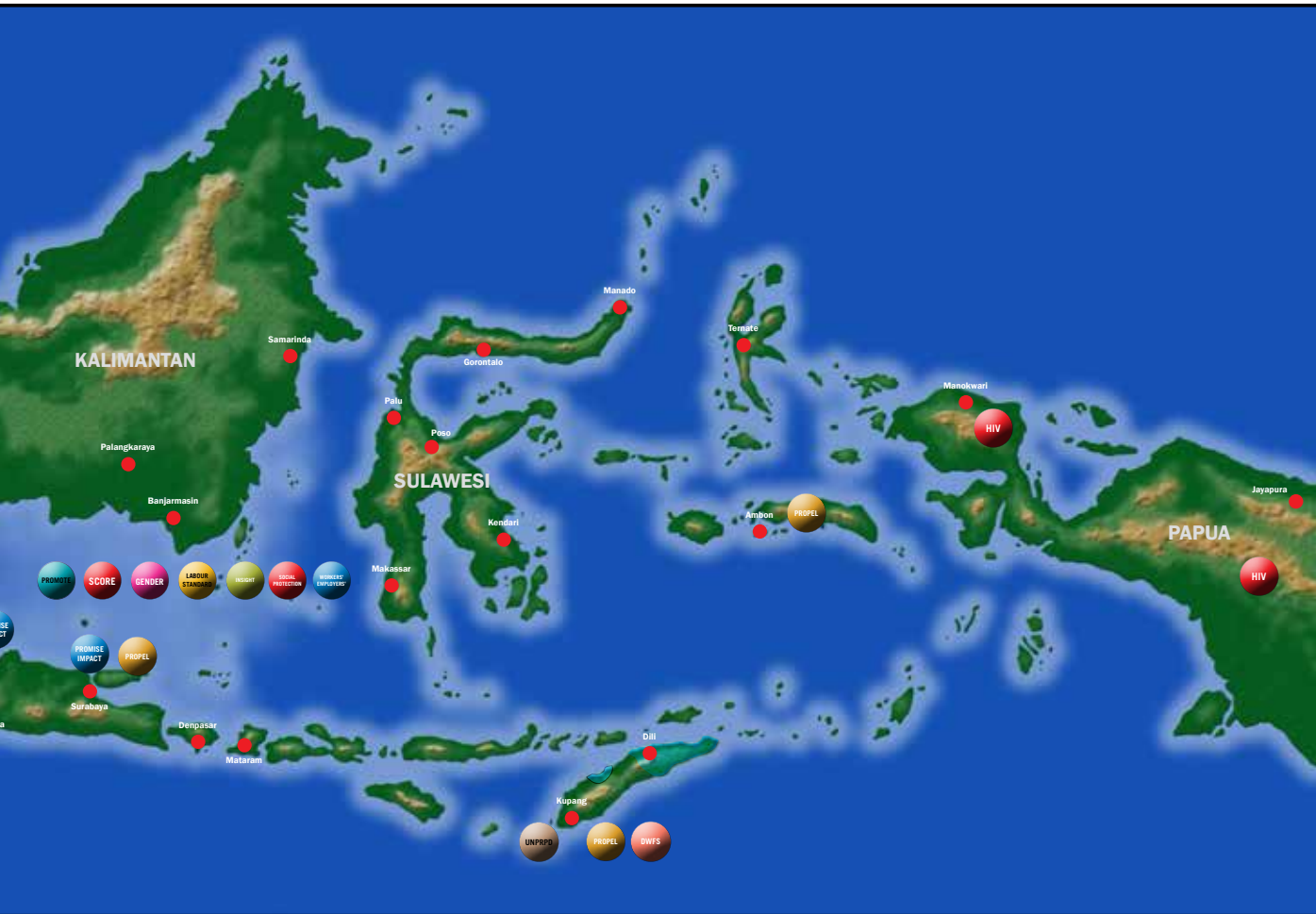
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



Norad



n ILO di Indonesia



A photograph of a man in a white t-shirt and a white cap with a black logo, pointing his right index finger towards the camera. He is standing next to a green motorcycle. The background is a bright, slightly hazy outdoor setting.

A. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

1. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan ekonomi makro, tenaga kerja dan sosial melalui perangkat dan analisis pasar tenaga kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih melengkapi perempuan dan laki-laki muda memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil-hasil lapangan kerja dari investasi publik dan masyarakat.
4. Peningkatan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.
5. Keterampilan tenaga kerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk lebih memenuhi keperluan pasar tenaga kerja.



Program Kestinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE)

Sekilas:

Diluncurkan pada Juli 2010, program SCORE Indonesia dirancang untuk membantu usaha kecil-menengah (UKM) di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja, mengurangi jejak (karbon) lingkungan dan mempererat kerjasama serta komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Program ini membantu perusahaan agar lebih berdaya saing di pasar global sehingga menciptakan lapangan kerja.

Didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD), program SCORE ini didukung dan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), konfederasi serikat pekerja nasional dan Yayasan Dharma Bhakti Astra. Indonesia terpilih sebagai satu dari tujuh negara bersama dengan India, Cina, Afrika Selatan, Ghana, Vietnam, dan Kolombia untuk menerapkan program SCORE.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Pengenalan dan penerapan metodologi SCORE di Provinsi Aceh dan Jambi** melalui Pelatihan untuk Pelatih (ToT) dan Pelatihan Perusahaan (ToE), yang difasilitasi dua pelatih SCORE berpengalaman dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan tambahan dua provinsi ini, cakupan keseluruhan provinsi program SCORE mencapai 13 provinsi.
2. **Pengenalan dan penerapan metodologi SCORE kepada tiga layanan pengembangan bisnis swasta (BDS) dan dua Asosiasi.** BDS yang terlibat adalah Karya Dua Perempuan, Riwani Globe dan Bina Mitra Usaha sementara Asosiasi yang terlibat adalah Asosiasi Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda (ISA) dan Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI).
3. **Penerapan Modul 1 SCORE mengenai Kerjasama di Tempat Kerja di Solo dengan menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.**
4. **Penyelenggaraan lokakarya SCORE versi singkat di Yogyakarta, didanai oleh Kementerian Luar Negeri.** Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan pelatihan dan kegiatan SCORE pada 2015 di Bali, dan di Yogyakarta pada 2016.
5. **Komitmen Yayasan Sampoerna untuk menyediakan dana sebesar 24.000 dolar Amerika bagi kegiatan pelatihan SCORE di Pandaan, Jawa Timur.** Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan penyedia layanan teknis BEDO yang bertindak sebagai fasilitator bagi 24 UKM di dalam rantai nilainya. Pada akhir tahun 2016, Sampoerna telah memberikan dana tambahan sebesar 95.000 dolar Amerika untuk pelaksanaan kegiatan SCORE di lima kota di Jawa Timur.
6. **Pengenalan dan implementasi metodologi SCORE kepada Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Bali,** bersama-sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
7. **Penguatan kapasitas para pelatih SCORE untuk Modul 3 tentang Produksi yang Lebih Bersih, dengan dukungan dari proyek UNIDO mengenai Efisiensi Sumber Daya dan Produksi Bersih (RECP).** Metodologi RECP telah diajarkan kepada para pelatih SCORE dari 11 provinsi.

8. **Pengembangan sistem pangkalan data berbasis daring untuk produktivitas,** bekerja sama dengan Direktorat Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
9. **Partisipasi lima wakil pemangku kepentingan produktivitas Indonesia dalam lokakarya produktivitas gabungan** SCORE dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Bangkok, Thailand, mengenai "Produktivitas dan Kondisi Kerja di UKM".
10. **Peningkatan produktivitas diperlihatkan oleh 186 perusahaan yang berpartisipasi dalam program SCORE dari tahun 2010 hingga 2016 setelah menerapkan metodologi SCORE** dalam kegiatan sehari-hari mereka. Sejak tahun 2010, 1.090 pekerja telah berpartisipasi dalam lokakarya dan kegiatan SCORE serta 668 kunjungan ke perusahaan telah dilaksanakan.
11. **Sebanyak 207 pelatih produktivitas telah dilatih** dan 11 di antaranya telah menerima sertifikasi SCORE Global.
12. **Peningkatan biaya pemulihan hingga 41 persen** sebagai hasil dari kontribusi aktif para mitra dalam penerapan SCORE di Indonesia.

Target Tahun 2017:

- Bersama dengan para konstituen, memfinalisasi Rancangan Proyek SCORE Indonesia Tahap III.
- Mendukung program peningkatan produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
- Melaksanakan sertifikasi SCORE Global untuk para pelatih SCORE Indonesia terpilih.
- Membangun Pusat SCORE Nasional Indonesia
- Melaksanakan lokakarya Produktivitas ILO SCORE - OECD
- Melaksanakan ToT dan ToE SCORE secara intensif, bekerja sama dengan Apindo dan serikat-serikat pekerja.
- Memulai dan memperluas kerjasama antara SCORE Indonesia dengan kementerian-kementerian dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya terkait produktivitas.

Melakukan transformasi dari hal-hal kecil yang berdampak besar

Tidak mudah mengubah kebiasaan pekerja yang telah bertahun-tahun bekerja untuk perusahaan ini. Namun, kami secara terbuka mengajak para pekerja berdiskusi dalam pertemuan dua mingguan. Kami membahas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan dan mengajak pekerja melakukan perubahan demi keberlangsungan perusahaan.

Ratna Dewi Katarina Kuhn

Wakil Presiden Direktur



BUNYI dengungan mesin-mesin jahit yang saling berpacu memenuhi lorong PT Dianatina Ayu yang berlokasi di daerah Kuta, Bali. Suara dengungan itu dihasilkan puluhan pekerja yang menghasilkan berbagai jenis garmen untuk diekspor ke berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika, Australia dan juga beberapa negara di kawasan Asia.

“Perusahaan ini didirikan oleh ayah kami, Panudiana Kuhn, sejak 30 tahun yang lalu. Kami adalah generasi kedua yang dipercaya untuk mengelola perusahaan ini,” ujar Surya Ayu Paulina Kuhn, Presiden Direktur perusahaan tersebut. Dalam kegiatan kesehariannya, Surya dibantu oleh adik kandungnya, Ratna Dewi Katarina Kuhn, Wakil Presiden Direktur, dalam menjalankan bisnis keluarga mereka.

PT. Dianatina Ayu telah mengalami pasang surut dalam tiga dasawarsa perjalanan perusahaan ini, khususnya pada tahun 2006-2007 ketika perusahaan harus menghadapi kuatnya persaingan global dari negara China. Situasi tersebut menghantam bisnis ini cukup keras sehingga memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerjanya menjadi setengah dari total keseluruhan

yang hampir mencapai 500 orang. Mereka pun masih harus memberhentikan beberapa ratus pekerja lagi setelah itu.

Berkurangnya jumlah pekerja secara besar-besaran mengakibatkan penumpukan beban kerja bagi pekerja yang ada. Karena harus menanggung beban kerja yang berat, upaya manajemen untuk meningkatkan efisiensi menjadi terhambat. Jumlah tenaga kerja yang sedikit menyebabkan tempat kerja menjadi kurang bersih dan tidak teratur.

Selanjutnya, Agung Sanjaya, Manajer Sumber Daya Manusia yang telah bekerja selama lima tahun di PT. Dianatina Ayu, mengatakan hal ini terjadi karena ketiadaan sistem komunikasi yang baik serta kebiasaan untuk mengajak pekerja berdiskusi guna memecahkan masalah.

“Manajemen perusahaan ketika itu belum menyadari bahwa keterbukaan dalam berkomunikasi dan, bahkan, penyebaran informasi di dalam perusahaan akan menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan membuat para pekerja menjadi lebih nyaman,” ungkap Agung.

Menuju transformasi kerja

Pada Oktober 2014, program ILO-SCORE Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pelatihan swasta, BEDO, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah di Bali.

Modul SCORE pertama yang berfokus pada kerjasama di tempat kerja membawa harapan baru bagi perusahaan yang sedang mencoba untuk bangkit kembali ini. "Selepas pelatihan selesai, kami langsung duduk bersama untuk menyusun program untuk melakukan pembenahan dalam perusahaan kami," kata Surya.

Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Tim Peningkatan Perusahaan (TPP) untuk menerapkan program SCORE di dalam perusahaan. Kesungguhan TPP ini terlihat melalui penandatanganan komitmen antara manajemen dan pekerja serta kegiatan sosialisasi rencana kerja tim kepada seluruh pekerja.

Selanjutnya guna meningkatkan komunikasi dan kerjasama, tim ini mulai memperkenalkan pentingnya rapat harian, rapat dua mingguan, dan perayaan ulang tahun pekerja. "Kegiatan yang kami lakukan terlihat sangat sederhana tetapi justru merupakan kegiatan yang paling memberikan dampak besar terhadap proses produksi di perusahaan kami," ujar Surya.

Yetik R. Diana, salah seorang penyelia di PT. Dianatina Ayu, mengatakan bahwa ia menjadi lebih memahami keuntungan dilakukannya rapat harian yang kini digalakkan di perusahaan tersebut. "Kami semua di bagian produksi mendapatkan masukan apabila menghadapi persoalan dan juga menjadi lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi unit lain. Ini telah mempercepat kerja kami dan menghindari saling lempar tanggung jawab apabila ada kesalahan di bagian produksi," ungkap Yetik.

Selain itu perusahaan telah memberikan perhatian yang lebih besar kepada saran dan umpan balik pekerja melalui kotak saran. Kotak saran ini dibuka setiap tiga bulan, bersamaan dengan perayaan

Skema komunikasi dan rapat harian yang mulai terbangun ini telah meningkatkan penyelesaian pekerjaan dan mempengaruhi ketepatan waktu dalam pengiriman produk. Pada Januari 2015, ketepatan waktu dalam pengiriman produk mencapai 89,47 persen dan bahkan pada Februari mencapai 100 persen.

ulang tahun pekerja. "Perusahaan bahkan memberikan penghargaan kepada pekerja yang dapat memberikan saran yang baik kepada perusahaan. Saya senang sekali," kata Wayan Sumba, seorang pekerja di unit pemotongan bahan.

Selain kotak saran, PT. Dianatina Ayu kini juga memaksimalkan penggunaan papan pengumuman di perusahaan. Perusahaan juga mempromosikan "5S" melalui kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan limbah, pembuatan jadwal piket kebersihan, dan pelaksanaan 5S di setiap unit kerja.

Sebagai hasilnya, unit-unit kerja perusahaan kini menjadi lebih teratur. "Dulu perlu waktu 15 menit untuk mencari bahan yang diperlukan. Sekarang saya tidak perlu membuang waktu lagi karena semua bahan dan peralatan sudah tersusun rapi, termasuk data kegiatan dari hari sebelumnya. Dari segi waktu, ini sangat efisien," ujar Yetik, yang sudah menjadi penyelia di perusahaan ini selama 15 tahun. ❖



Proyek Perluasan Kesempatan Kerja melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Kapasitas Wirausaha dan Akses terhadap Keuangan (PROMISE IMPACT)

Sekilas:

Sebagian besar usaha di Indonesia dikelompokkan sebagai usaha mikro dan kecil (UKMK). UKMK menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 93 persen pekerja di negara ini. Dalam hal nilai tambah, UKMK berkontribusi sekitar 43 persen pada pendapatan negara dalam negeri. Namun produktivitas usaha kecil terbilang rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UKMK adalah kurangnya akses mereka atas layanan finansial dan non-finansial yang secara negatif memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas mereka.

Proyek PROMISE IMPACT ILO ini bertujuan mendorong inklusi finansial yang berkelanjutan dan bertanggungjawab bagi UKMK. Dari sisi pasokan, proyek ini membantu lembaga keuangan mengembangkan layanan inovatif kepada UKMK, terutama di sektor manufaktur. Dari sisi permintaan, program ini membantu UKMK mengakses layanan-layanan ini, meningkatkan produktivitas dan memungkinkan mereka menggunakan pembiayaan secara lebih efektif dan bijaksana. Pada tataran hulu, proyek ini mendukung formulasi dan pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang mendukung inklusi finansial secara bertanggungjawab.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Pelaksanaan pelatihan Manajemen Kinerja Sosial (MKS)** kepada lembaga-lembaga keuangan, para pembuat kebijakan dan penyedia jasa keuangan lainnya. MKS memberikan kerangka untuk mengarusutamakan layanan sosial dan mencapai "tujuan ganda" (*double bottom line*) terkait keuntungan secara finansial untuk lembaga keuangan dan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi para nasabah mereka.
2. **Penentuan mitra-mitra proyek yang potensial setelah diseminasi informasi dan konsultasi kepada lebih 70 lembaga keuangan serta sejumlah asosiasi di dua provinsi sasaran: Jawa Barat dan Jawa Timur.** Lebih dari 30 lembaga keuangan menjalani penilaian kelembagaan untuk membantu proyek mengkaji kesesuaian mereka sebagai mitra di masa mendatang. Penilaian ini mencakup serangkaian bidang seperti tata kelola, proses bisnis, keberlanjutan finansial dan kemampuan potensial lembaga keuangan dalam mencapai dampak sosial dan keuangan.
3. **Pemilihan 15 lembaga keuangan untuk mengembangkan proyek inovatif dalam mengujicoba produk dan jasa** yang dapat menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi nasabah mereka. Sebagai bagian dari proses ini, lembaga keuangan terpilih menjalankan survei agar lebih memahami pasar dan kebutuhan para nasabah mereka.
4. **Empat lembaga keuangan menyelesaikan survei klien, sementara sisanya akan diselesaikan pada akhir Maret 2017.** Proyek percontohan dengan lembaga-lembaga keuangan ini akan berjalan selama 12-18 bulan. Hasilnya akan diukur menggunakan uji kendali acak (RCT), sebuah metode yang efektif secara ilmiah dalam mengukur perubahan dan penyebabnya agar dapat dilakukan intervensi.
5. **Pelaksanaan Proyek yang inovatif dengan BPR UMKM, bank desa atau Bank Perkreditan Rakyat,** yang berfokus dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Staf peminjaman dari BPR UMKM menerima pelatihan dari ILO mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan selanjutnya mereka melatih para nasabah. Dua survei dilakukan untuk mengukur

dampak pelatihan pada tataran nasabah dan hasilnya secara umum positif.

6. **Peningkatan kapasitas berbagai lembaga keuangan guna meningkatkan kinerja dan dampak mereka terhadap nasabah.** Sebagai bagian dari proses ini, 15 pelatih lokal mengikuti pelatihan "Making Microfinance Work (MMW)", sebuah pelatihan yang dikembangkan oleh ILO untuk membantu manajer lembaga keuangan meningkatkan efisiensi dan mencapai hasil yang lebih baik.



Target Tahun 2017:

- Mengembangkan dan menerapkan semua proyek percontohan dengan lembaga keuangan (10-15).
- Melakukan setidaknya 10 survei dasar sebagai bagian dari pelaksanaan proyek-proyek percontohan.
- Melaksanakan pelatihan "Making Microfinance Work" bagi para manajer lembaga keuangan. Sebagian besar dari pelatih lokal ini akan menjadi pelatih bersertifikat setelah mengikuti pelatihan ini.
- Meningkatkan kinerja dan layanan lembaga keuangan melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas.
- Memberikan bantuan teknis dan saran strategis kepada lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat lingkungan yang memungkinkan inklusi finansial di negara ini.

Mendorong inklusi finansial bagi semua

“MENINGAT akses atas keuangan bagi usaha mikro dan kecil (UKM) di Indonesia masih mengalami banyak keterbatasan, tugas yang juga menantang adalah memastikan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan benar-benar memenuhi kebutuhan UKMK dan memberikan nilai bagi para nasabah” demikian ungkap Owais Parry, Kepala Penasihat Teknis Proyek PROMISE IMPACT ILO. Dia menjelaskan hal ini saat seminar satu hari di Jakarta mengenai Keuangan Inklusif dan Manajemen Kinerja Sosial pada 14 Desember 2016.

Seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari Proyek PROMISE IMPACT yang didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO). Seminar ini menjadi sarana untuk bertukar pengetahuan mengenai layanan keuangan terhadap UKM dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Seminar ini dihadiri lebih dari 50 peserta termasuk para pejabat pemerintah senior, manajer lembaga keuangan, perwakilan asosiasi dan jejaring, akademisi dan praktisi dari industri keuangan.

Belakangan ini, cepatnya komersialisasi keuangan mikro mengakibatkan banyak lembaga keuangan mencapai skala ekonomi dan tingkat keuntungan yang besar. Hal ini kemudian mengarah kepada “pergeseran misi”. Sejumlah lembaga keuangan di tingkat hilir memulai upaya mereka untuk menjangkau rumah tangga berpendapatan rendah dan usaha kecil dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, upaya mendapatkan keuntungan yang tinggi dan jangkauan yang luas telah melemahkan kedalaman jangkauan tersebut. Keberhasilan semakin dimaknai secara sempit dan dinilai dari besarnya nilai aset, ekuitas dan kepemilikan lembaga keuangan. Hanya segelintir lembaga keuangan yang berupaya memastikan layanan mereka bermanfaat bagi para nasabah.

Karenanya, terdapat kebutuhan bagi lembaga keuangan untuk memikirkan kembali dan menempatkan nasabah mereka sebagai pendorong misi mereka. Tujuan sebaiknya berupaya membangun industri keuangan yang inklusif dan menawarkan beragam produk dan layanan yang menciptakan nilai, mendorong penciptaan lapangan kerja serta produktivitas seraya memastikan keuntungan yang wajar bagi lembaga keuangan.

“MKS membantu lembaga keuangan memastikan timbal balik keuangan yang sehat, namun di saat yang sama juga melampaui keuntungan jangka pendek. Banyak orang berpikir MKS dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah satu dan hal yang sama. Namun tidak seperti itu. MKS merupakan cara untuk mengelola lembaga keuangan agar mencapai tujuan ganda.”

Frances Sinha

*M-CRIL dan anggota aktif Gugus Tugas
Kinerja Sosial (SPTF)*

Saat berbagi pengalaman global, Frances Sinha dari M-CRIL dan anggota aktif Gugus Tugas Kinerja Sosial (SPTF) menjelaskan bahwa manajemen kinerja sosial (MKS) merupakan kerangka yang disepakati secara global untuk membantu lembaga keuangan mengembangkan sistem dan proses usaha yang memastikan keuntungan finansial serta kontribusi yang dapat mereka lakukan terhadap hasil pembangunan.

Dia menambahkan MKS memberikan kerangka yang jelas kepada lembaga keuangan untuk mengadaptasi proses usaha mereka, mewujudkan tujuan finansial serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial para nasabah.

Seminar ini mengkaji tantangan dan kesempatan di Indonesia untuk mengarusutamakan MKS. Satu sesi penuh didedikasikan untuk membahas pendekatan dan praktik MKS di Indonesia. Para manajer senior dari lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Koperasi Syariah BMT itQan, BPR UMKM Jatim, dan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) berbagi hasil kerja mereka.

Pesan utama dari diskusi-diskusi tersebut adalah pemberian layanan yang mengutamakan nasabah lebih menguntungkan bagi lembaga keuangan secara jangka panjang. Mereka menekankan bahwa layanan yang berorientasi nasabah dapat membantu lembaga keuangan meminimalisir risiko, memastikan keberlanjutan dan meningkatkan jangkauan nasabah. ❖



Program Bantuan Pemulihan Gunung Sinabung (SIRESUP)

Sekilas:

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, meletus pada 29 Agustus 2010 yang mengakibatkan 12.000 orang harus mengungsi. Segera setelahnya, kegiatan vulkanik menurun dan kemudian kembali meningkat pada September 2013, menyebabkan 15.000 orang harus mengungsi. Sejak itu, kegiatan vulkanik turun ke Waspada Tingkat 2 pada akhir September 2013. Pada Oktober 2013, kegiatan vulkanik kembali meningkat menjadi Siaga Tingkat 3 pada 3 November 2013.

Menanggapi krisis tersebut, pemerintah daerah menyatakan keadaan darurat. Mengamati gunung berapi tersebut menjadi semakin aktif, statusnya pun meningkat menjadi Awas Tingkat 4 pada 24 November, dan keadaan darurat diperpanjang hingga 7 Desember 2013. Hingga saat ini, Gunung Sinabung masih terus mengalami aktivitas vulkanik yang tinggi.

Untuk menanggapi situasi ini, ILO bersama dengan UNDP dan FAO membantu Pemerintah Indonesia melalui sebuah proyek bersama yang berjudul: "Program Bantuan Pemulihan Sinabung (SIRESUP)". Proyek ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada upaya pemulihan pasca bencana di daerah-daerah yang terkena dampaknya. Hasil dari Proyek ini adalah komunitas-komunitas yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung 2013-2014 kembali pulih dengan mata pencaharian yang berkelanjutan dan ketangguhan yang lebih tinggi.

Didukung oleh:



IMDFF-DR



Capaian Tahun 2016:

1. **Penyelesaian Kajian Kebutuhan Pelatihan Keterampilan berdasarkan analisis rantai nilai.** Kajian ini bertujuan untuk merancang program pelatihan secara rinci guna memberikan dukungan kepada pemulihan mata pencaharian komunitas yang terkena dampak termasuk pelatihan keterampilan berdasarkan orientasi pasar dan durasi proyek.
2. **Pelaksanaan tiga pelatihan keterampilan mengenai pembuatan makanan (makanan ringan), perbaikan sepeda motor dan keterampilan menjahit** berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pelatihan Keterampilan. Pelatihan ini diikuti 50 peserta.
3. **Bantuan pasca pelatihan (ATS) bagi 50 peserta yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan untuk memulai bisnis mereka.** ATS terdiri dari penyediaan alat kerja baku yang memungkinkan para peserta memulai bisnis mereka dan memberikan bantuan untuk pengembangan bisnis.
4. **Pelatihan bagi 11 koperasi potensial mengenai Mengelola Koperasi Pertanian Anda—My.COOP.** Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat manajemen koperasi, memungkinkan mereka menawarkan pelayanan berkualitas tinggi yang efektif dan efisien bagi anggota mereka. Koperasi ini dipilih bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Industri dan UKM di Kabupten Karo. Pelatihan ini difasilitasi oleh pelatih yang bersertifikasi dari BDSP dan pegawai pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pelatihan bagi pelatih dalam My.COOP.

Target Tahun 2017:

- Terus memberikan dukungan kepada para penerima manfaat melalui bantuan lapangan langsung mengenai pengembangan bisnis termasuk dukungan dalam meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.

5. **Penguatan kapasitas koperasi di daerah relokasi melalui bantuan usaha dan pelatihan.** Koperasi saat ini menyediakan program simpan pinjam serta membuka toko sembako. Alhasil, jumlah anggota koperasi telah meningkat dari 21 menjadi 135 orang.
6. **Penyelesaian serangkaian pelatihan mengenai pendidikan keuangan dan kewirausahaan menggunakan modul GET Ahead kepada 80 komunitas terpilih di daerah yang terdampak,** bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen keuangan, menentukan tujuan keuangan keluarga, dan mulai mempertimbangkan peluang bisnis/mata pencaharian. Pelatihan ini dilakukan sekitar 16 pelatih lokal yang bersertifikasi yang telah menyelesaikan pelatihan bagi pelatih mengenai Pendidikan Keuangan bagi Keluarga dan Kewirausahaan menggunakan modul GET Ahead.
7. **Pelaksanaan pelatihan mengenai hak kaum muda terkait pekerjaan** bagi penerima manfaat langsung termasuk pejabat pemerintah daerah dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Koperasi, Industri dan UKM dan serikat pekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai standar ketenagakerjaan.



Setelah erupsi gunung berapi: Mengubah bencana menjadi peluang



BERCOCOK tanam awalnya menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarga Basmadi Kapri Peranginanginan, 27 tahun. Tinggal di Desa Kuta Mbelin, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, sebagian besar penduduk desa mendapatkan penghidupan dari bercocok tanam sayuran. Terletak dekat dengan Gunung Sinabung, daerah ini dikenal akan kesuburan tanah dan produktivitasnya, terutama sayuran dan buah.

Meletusnya Gunung Sinabung pada 2013 telah mengubah hidup Basmadi dan keluarganya serta warga desa lainnya. Kini mereka tidak lagi bekerja di ladang karena kerusakan yang diakibatkan abu vulkanik. Mereka juga terpaksa pindah ke kamp pengungsian di ibukota kabupaten Karo, Kabanjahe, selama satu tahun.

Demi menyambung hidup, anak tertua dari tiga bersaudara laki-laki dan satu perempuan ini bekerja sebagai buruh tani. Ia menerima upah harian sebesar Rp. 60.000-Rp. 70.000. "Saya hanya menerima upah kalau ada pekerjaan. Sayangnya pekerjaan tidak selalu ada setiap hari karena saya hanya bekerja bila ada permintaan," kisah dia.

Setelah satu tahun tinggal di kamp pengungsian, Basmadi memutuskan kembali ke desa asalnya. Ia menikah dan mulai bekerja di kebun keluarganya. Mereka mencoba menanam kentang dan sayuran. Namun abu vulkanik lagi-lagi merusak kebun mereka dan mengakibatkan gagal panen. Ia kemudian memutuskan untuk menyewa rumah di Siosar, sebuah daerah relokasi yang disediakan pemerintah untuk tiga desa yang hancur akibat erupsi.

"Saya baru saja mulai berkeluarga dan punya tanggung jawab yang lebih besar. Saya harus berjuang untuk mereka. Saya berniat mencari peluang baru di Siosar. Sebuah awal yang baru untuk membangun kehidupan kami dengan mencoba mata pencaharian dan peluang baru selain bercocok tanam," ujarnya, mengingat kepindahannya ke Siosar pada Desember 2015.

Sebagai lulusan dari jurusan otomotif sebuah Sekolah Menengah Kejuruan, ia mencoba membuka bengkel motor kecil. Karena keterbatasan biaya dan alat, ia hanya mampu memperbaiki ban

"Saya sekarang bahkan bisa menabung. Dalam sebulan saya bisa menabung Rp. 2.500.000 yang akan saya gunakan untuk kebutuhan anak perempuan dan memperluas usaha saya. Saya pernah merasa bingung, tapi kini saya bersemangat merencanakan masa depan saya. Saya pun bisa tertawa lagi dan tidak lagi berputus asa."

kempes dan membersihkan karburator. Ia mendapat uang sekitar Rp. 1 juta per bulan yang hanya cukup menghidupi kebutuhan dasar keluarganya.

Pada Mei 2016, Basmadi mendapatkan informasi mengenai program kaum muda ILO melalui Program bersama ILO-FAO-UNDP yang didukung New Zealand's International Aid and Development Agency bernama "Program Bantuan Pemulihan Sinabung" (SIRESUP). Program ini merekrut orang-orang muda dari desa-desa yang terkena dampak erupsi sebagai peserta pelatihan memperbaiki motor. Selain pelatihan teknis, program ini juga memberikan pelatihan mengenai pendidikan keuangan dan kewirausahaan.

"Menggunakan modul pelatihan kewirausahaan GET Ahead ILO, kami mencoba mengembangkan pelatihan yang memadukan keterampilan teknis dan kecakapan hidup. Kami berharap para peserta tidak hanya belajar bagaimana meningkatkan keterampilan namun juga akan dilengkapi dengan pengetahuan tentang bagaimana melakukan administrasi, pemasaran dan penghitungan keuangan yang tepat," jelas Aidil Azhari, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Pemulihan Sinabung.

Setelah menyelesaikan pelatihan, Basmadi kemudian menerima bantuan pasca pelatihan (ATS) dalam bentuk alat dan bantuan usaha. Kini ia dapat memperluas layanan bengkel motornya dan meningkatkan pendapatannya sebesar tiga kali lipat menjadi Rp. 3,5 juta per bulan.

"Dengan pengetahuan dan alat yang diberikan ILO, kini saya menjadi terampil dalam memberikan berbagai layanan. Saya sekarang bisa membongkar dan memasang mesin motor dan memperbaiki bagian mesin lain yang dulu tidak bisa saya lakukan," kata dia.

Tidak hanya semakin terampil, Basmadi pun lebih memahami masalah keuangan. Ia menyiapkan rencana keuangannya sendiri sehingga dapat memperluas usahanya dan membeli alat serta onderdil baru. ❖



Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur

Sekilas:

Saat ini hampir satu miliar penduduk dunia mengalami kelaparan kronis. Di saat yang sama kenaikan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperburuk masalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, keresahan sosial dan ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi persoalan ini, program ILO, “Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan”, bertujuan untuk mempromosikan ketahanan pangan melalui sistem pangan yang lebih baik dengan memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan layak yang didukung hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan dialog sosial. Pekerjaan layak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi dan pengolahan pangan, meningkatkan akses serta menyediakan penghasilan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan menjamin ketersediaan pangan mereka.

Di Indonesia, proyek ini berupaya mempromosikan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan bagi masyarakat desa di kabupaten-kabupaten yang paling rentan dan tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan kesempatan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan layak, serta memperluas kesempatan wirausaha dalam rantai nilai tanaman pangan yang penting—terutama jagung, rumput laut dan hewan ternak—yang memiliki potensi pekerjaan dan penghasilan yang tinggi.

Proyek ini berakhir pada Desember 2016.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

Capaian Keseluruhan

1. **Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan antara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, ILO dan FAO mengenai Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan di Provinsi NTT.** Prakarsa kemitraan ini telah menjadi pencapaian besar dalam kemitraan global yang bersifat multidimensional untuk menciptakan pekerjaan layak bagi para petani dan meningkatkan pendapatan pedesaan di NTT sebagai rantai nilai agro pertanian—terutama untuk jagung, rumput laut dan daging sapi.
2. **Sinkronisasi dan integrasi rencana aksi untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor ternak dan pertanian.** Di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Dinas Peternakan, 161 desa mampu memiliki rencana aksi yang terintegrasi dan sinkron guna meningkatkan produktivitas dalam sektor peternakan serta pertanian secara umum melalui sebuah Rencana Induk yang komprehensif yang memasukkan pekerjaan yang layak dan praktik-praktik peternakan yang baik.
3. **Pembentukan jejaring pasar yang beragam.** Sekitar 11 kelompok pemasaran kolektif, terdiri dari 5 hingga 10 kelompok petani yang terdiri dari 20 hingga 25 petani penggarap, memiliki jejaring pasar beragam yang menawarkan lebih banyak insentif serta margin keuntungan dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan kondisi kerja.
4. **Replikasi hasil-hasil lokakarya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam sebuah lokakarya serupa di Lampung** dan telah diuji coba di dua desa. Alat bantu pelengkap berupa daftar mengenai kesehatan dan keamanan dalam sektor peternakan dan jagung telah disusun dan diujicobakan di empat desa.
5. **Peningkatan usaha dan akses terhadap pinjaman di atas Rp. 500 juta.** Lima kelompok peternak, terdiri dari 20 peternak perorangan, telah meningkatkan bisnis mereka dan diberikan akses atas pinjaman di atas Rp. 500 juta agar dapat merencanakan serta mengelola keuangan dan bisnis mereka dengan lebih baik.
6. **Kepastian pasar yang lebih baik bagi petani jagung garapan.** Kurang lebih 350 petani jagung garapan telah menikmati pasar yang lebih baik karena kontrak yang telah dibuat oleh kelompok dagang atau kelompok pemasaran kolektif setempat yang memfasilitasi jejaring pasar baru.
7. **Pengembangan usaha baru oleh tiga kelompok dagang rumput laut atau kelompok dagang kolektif lainnya melalui pengembangan pupuk dan pestisida organik** lokal sebagai sebuah peluang bisnis baru untuk menghasilkan pendapatan.
8. **Pengadopsian berbagai perangkat ILO oleh lima lembaga setempat untuk diimplementasikan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan mereka sendiri.** Hingga saat ini, 400 peserta tambahan telah dilatih oleh lembaga-lembaga ini. Balai latihan koperasi di tingkat provinsi yang dijalankan oleh departemen koperasi telah mengalokasikan dana untuk melatih lebih dari 500 kaum muda pada tahun anggaran 2017 dan satu universitas di Sumba Timur telah mengadopsi modul manajemen keuangan ILO sebagai modul pelengkap untuk para mahasiswanya.
9. **Semua petani peternak di empat desa sasaran telah menerima manfaat dari mekanisme perdagangan yang baru dan telah meningkatkan transparansi pasar** akibat dari proses dialog yang difasilitasi oleh proyek.
10. **Pengembangan sistem informasi pasar oleh sepuluh kelompok dagang daerah atau kelompok pemasaran kolektif bersama.** Sistem ini telah diperbarui secara rutin guna mendorong fasilitasi ke pasar yang lebih luas dan untuk mendorong para petani untuk bergabung dalam mekanisme pemasaran kolektif.

Belajar dari pengalaman ILO dalam mempromosikan ketahanan pangan dan pembangunan desa berkelanjutan

KETAHANAN pangan merupakan salah satu hambatan pembangunan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim pertanian dan musim. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah NTT untuk mendorong produksi pertanian dan mengadopsi langkah-langkah penunjang bagi para petani.

Untuk bersama-sama menanggulangi masalah ketahanan pangan, ILO, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), telah mengembangkan program bersama selama dua tahun mengenai pekerjaan layak untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT.

Dikoordinir oleh Kementerian Desa, program bersama yang didanai oleh Badan untuk Kerjasama Pembangunan Luxembourg (Luxembourg Agency for Development Cooperation) dan ILO ini berfokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, peluang kerja dan perluasan peluang kewirausahaan dalam rantai nilai makanan agro, khususnya jagung, rumput laut dan ternak.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyatakan keamanan pangan dan pembangunan pedesaan berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia. Apalagi pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama untuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.

“Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa mengalokasikan lebih dari Rp 20,7 triliun untuk pembangunan pedesaan yang juga berarti tiap desa menerima Rp 320 juta. Kami telah meningkatkan alokasi menjadi Rp 46,98 triliun tahun ini, dan sejauh ini kami telah mentransfer 82 persen dari anggaran ke semua desa di dalam negeri,” ujar Anwar dalam kata



sambutanannya pada acara penutupan dari proyek bersama ini pada November 2016 lalu di Jakarta.

Menghargai komitmen pemerintah Indonesia, Alette Van Leur, Direktur untuk Departemen Sektor ILO Jenewa, memuji kesediaan Indonesia menjadi negara percontohan pertama untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. “Indonesia menjadi salah satu negara anggota ILO yang sepenuhnya merangkul pekerjaan yang layak untuk pembangunan pedesaan dengan dukungan kuat dari para konstituen tripartit, yang bertujuan membuka potensi dan peluang lainnya di wilayah pedesaan,” katanya.

Selama acara penutupan, berbagai capaian dari proyek bersama ini dipaparkan. Pelajaran yang diperoleh dan praktik terbaik program ini juga dibagi di antara para peserta dari organisasi-organisasi terkait, antara lain, kementerian, organisasi internasional dan nasional, akademisi, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan lain sebagainya. ❖



B. Hubungan industrial yang baik dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan pelayanan yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk mengaplikasikan peraturan dan standar ketenagakerjaan internasional.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan kontribusi menyuarakan hubungan industrial menurut mandat dan tanggung jawab mereka masing-masing.



Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global – Tahap II

Sekilas:

Proyek ILO mengenai Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global terus melanjutkan upaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja pada rantai pasokan sektor garmen melalui promosi perundingan kerja bersama serta dialog sosial yang efektif dengan meningkatkan akses para pemangku kepentingan terhadap informasi, memperkuat sistem untuk memastikan penerapan standar ketenagakerjaan di perusahaan dan meningkatkan kapasitas para konstituen tripartit. Sejalan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 78/2015, pada tahap kedua ini proyek lebih terfokus pada bagaimana meningkatkan dialog sosial mengenai pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengupahan di tingkat nasional dan sub-nasional, serta mendorong perundingan bersama di tingkat perusahaan.

Didukung oleh: **BMZ**  Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

giz  Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Capaian Tahun 2016:

1. **Dukungan terhadap Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):** Agenda Indonesia Menuju Pekerjaan Layak untuk Semua. Acara ini memprakarsai dialog di antara para konstituen tripartit dan pemangku kepentingan utama di tingkat nasional mengenai agenda Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama Tujuan Nomor 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Konferensi ini semakin menegaskan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan dalam menerapkan agenda Indonesia dalam SDGs sebagai upaya pekerjaan layak untuk semua melalui dialog sosial.
2. **Dukungan terhadap Dialog Tripartit Tingkat Tinggi mengenai Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.** Sebagai tindak lanjut dari Konferensi SDGs, acara ini menjadi dialog sosial yang efektif di antara perwakilan konstituen untuk menyepakati agenda kegiatan dalam menangani sejumlah isu prioritas seperti pengembangan keterampilan, jaminan sosial dan bentuk-bentuk kerja non standar, dan upah serta perundingan bersama.
3. **Pengembangan kapasitas bagi konstituen terkait melalui pelatihan untuk pelatih mengenai perundingan bersama dan negosiasi.** Sekitar 30 peserta yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta perwakilan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpartisipasi dan dilatih sebagai pelatih untuk perundingan bersama dan negosiasi. Para pelatih ini diharapkan dapat memberikan pelatihan yang efektif mengenai perundingan bersama kepada sejumlah perusahaan percontohan dalam proyek ini.
4. **Publikasi dua catatan penelitian berjudul "Kesenjangan upah berdasarkan gender masih terjadi di sektor garmen dan alas kaki di Asia" dan "Lemahnya kepatuhan terhadap peraturan upah minimum di industri garmen Asia".** Catatan penelitian ini disusun bersama oleh Kepala Penasihat Teknis Proyek Matt Cowgill dan Phu Huynh dari Kantor Regional ILO untuk Asia Pasifik di Bangkok. Kedua catatan penelitian itu juga mencakup kondisi yang ada di Indonesia.



Target Tahun 2017:

- Memfasilitasi pengembangan kesepakatan kerja bersama pada sejumlah perusahaan percontohan melalui pelatihan dan pembinaan.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga tripartit terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam diskusi mengenai kebijakan upah melalui lokakarya dan pelatihan.
- Mendukung terjalannya dialog sosial di antara para konstituen tripartit mengenai sejumlah isu prioritas dalam agenda SDGs.

Meningkatkan usaha melalui perundingan bersama

SEKITAR 30 peserta peserta dari Kementerian Ketenagakerjaan, kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat dan Jawa Tengah, organisasi pekerja dan pengusaha berpartisipasi dalam Pelatihan bagi Pelatih (ToT) mengenai perundingan bersama dan negosiasi di Bogor, Jawa Barat, pada September lalu. Pelatihan ekstensif selama tujuh hari ini bertujuan meningkatkan kemampuan kelembagaan para peserta sehingga mereka dapat memformulasikan kesepakatan perundingan bersama melalui proses perundingan bersama yang berbasis bukti.

ToT ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Standar Ketenagakerjaan dalam Rantai Pasokan Global. Didanai Kementerian Federal untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ) dan Korporasi Jerman untuk Kerjasama Internasional (GIZ), proyek ini terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja pada rantai pasokan garmen melalui perundingan



bersama dan dialog sosial yang efektif. Selain Indonesia, Proyek ini juga memiliki sejumlah kegiatan di Kamboja dan Pakistan serta di tataran regional dan global.

Christianus Panjaitan, Koordinator Proyek Standar Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa garmen merupakan salah satu industri prioritas dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia,

bersama dengan industri padat karya lain seperti tekstil, alas kaki, elektronika dan proyek infrastruktur. Berkontribusi sebesar 10-12 persen dari total lapangan kerja, garmen menjadi salah satu dari lima kontributor penting dalam sektor manufaktur.

Untuk memastikan keefektifan proses pelatihan, ToT menerapkan sebuah metode pelatihan khusus bernama Belajar dan Berkembang melalui Berpetualang (LEAD). Metode pembelajaran ini memadukan ceramah interaktif, bermain peran, kerja kelompok dan permainan simulasi. "Diharapkan metode ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai topik pelatihan, serta meningkatkan kemampuan dan perilaku mereka sebagai pelatih" tambah Christianus.

Pada akhir pelatihan, para lulusan program pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pembinaan bagi perwakilan pekerja dan pengusaha di perusahaan atau kelompok perusahaan dalam melakukan perundingan kerja bersama yang baik serta penyusunan kesepakatan kerja bersama. Sebagai tindak lanjut, mereka akan memberikan pelatihan di perusahaan-perusahaan percontohan di bawah proyek ini ❖

Karenanya, penting bagi perwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha mengambil langkah aktif dalam meningkatkan daya saing industri dengan menyepakati untuk saling bekerja sama mencapai tujuan bersama. Salah satu alat untuk mewujudkan tujuan itu adalah kesepakatan perundingan kerja bersama yang dapat dilaksanakan di tingkat perusahaan maupun berbagai perusahaan.

Christianus Panjaitan

Koordinator Proyek Standar Ketenagakerjaan



Program bagi Pengusaha dan Pekerja

Sekilas:

Struktur tripartit ILO merupakan struktur yang unik dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan suara yang sama bagi perwakilan pekerja dan pengusaha dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program ILO. Dialog sosial antara ketiga pihak ini menjadi dasar bagi kerja ILO dan ILO membantu mengembangkan kemampuan organisasi-organisasi ini sehingga dapat mendukung dan mewakili anggota mereka dengan efektif.

Organisasi pekerja bersifat mandiri dan demokratis yang melindungi hak dan kepentingan pekerja di tingkat nasional dan regional. Karenanya mereka memainkan peran penting dalam masyarakat sipil. Sementara itu, organisasi pengusaha mewakili kepentingan bisnis mengingat keterkaitan organisasi ini dengan kebijakan ketenagakerjaan dan sosial di tingkat nasional dan internasional. Organisasi ini memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung perusahaan yang berdayasaing dan berkelanjutan yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial.

ILO bekerja sama dengan empat konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-Rekonsiliasi K-SPSI Rekonsiliasi), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia- Kongres Jakarta (K-SPSI Kongres Jakarta), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahteraan Indonesia (K-SBSI). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merupakan organisasi pengusaha yang diakui di Indonesia yang dapat menangani masalah hubungan industrial dan pengembangan sumber daya manusia.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

Dukungan terhadap kegiatan pengusaha:

1. **Dukungan terhadap inisiatif pemagangan yang dipromosikan oleh Apindo.** Dari sudut pandang pengusaha, pemagangan memberikan perusahaan pekerja-pekerja muda yang menguasai keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan. Bergabung dengan Jejaring Pemagangan Global (GAN), Apindo mengembangkan Jejaring Pemagangan Indonesia yang bertujuan mendorong sistem pemagangan di perusahaan. Lokakarya pemagangan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, pada 2016 guna mempromosikan program pemagangan di tingkat perusahaan, terutama melalui Jaringan Indonesia.
2. **Dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Penilaian Dampak Peraturan** bagi anggota dewan regional Apindo dari sejumlah provinsi terpilih. Pelatihan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan Apindo dalam melakukan advokasi kebijakan dengan menggunakan perangkat berbasis bukti yang bertujuan memastikan aspirasi dunia usaha menjadi bagian utama dari kerangka kebijakan Indonesia.

Dukungan terhadap kegiatan pekerja:

1. **Pengembangan kemampuan pengurus serikat pekerja di sektor garmen melalui pelatihan perundingan bersama dan organisasi.** Pelatihan-pelatihan ini dilakukan dengan dukungan dari Biro Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV). ILO-ACTRAV memastikan kepentingan organisasi pekerja menjadi bagian dalam pengembangan kebijakan dan kegiatan ILO
2. **Bantuan bagi pengurus serikat pekerja di Indonesia melalui kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh ILO.** Melalui berbagai program dan proyek ILO, beragam kegiatan yang berkaitan dengan advokasi, pengembangan kapasitas dan dialog sosial yang melibatkan serikat pekerja diselenggarakan dengan mencakup isu-isu seperti daya saing dan produktivitas, pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga, kebebasan berserikat dan perundingan kerja bersama serta negosiasi.

Serikat pekerja perkuat kerjasama mendorong kerja layak bagi pekerja rumah tangga dan menghapus pekerja anak

SERIKAT -serikat pekerja memperkuat kerjasama dan upaya mereka dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi para pekerja rumah tangga (PRT) dan menghapuskan pekerja anak di Asia Pasifik sesuai dengan kesimpulan lokakarya serikat pekerja regional yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016.

Lokakarya bertajuk “Mengorganisir dan Pekerjaan Layak bagi PRT dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA),” menyatukan berbagai perwakilan serikat pekerja dan organisasi PRT dari sembilan negara di kawasan ini. Tujuan utama acara ini adalah mengevaluasi hasil inisiatif yang diambil oleh serikat pekerja dan organisasi PRT dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, meninjau kemajuan dalam penghapusan PRTA dan mendorong aksi tindak lanjut, termasuk kerjasama dan jejaring antara serikat pekerja untuk melakukan pengorganisasian, jaminan sosial dan kerja layak untuk PRT, termasuk PRTA.

Para peserta memaparkan prioritas jangka menengah dan panjang mereka, menyoroti pentingnya menjalin kerjasama dengan organisasi PRT dalam mendorong pengakuan PRT sebagai pekerja. Mereka juga memaparkan sejumlah inisiatif bagi anggota yang terorganisir dan meningkatkan peluang kerja layak bagi PRT.

Para peserta juga menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam menghapuskan pekerja anak dalam pekerjaan rumah tangga dan pentingnya memperkuat aliansi regional dalam menghapuskan PRTA.

Francesco d'Ovidio, Direktur ILO untuk Indonesia, mengingatkan para peserta bahwa kendati PRT telah memberikan kontribusi yang

Diadopsinya Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi No. 201 pada 2011 oleh Konferensi Perburuhan Internasional merupakan puncak perjuangan bertahun-tahun yang dilakukan oleh PRT perempuan di seluruh dunia untuk mendapatkan “pengakuan” dan dimulainya tahap baru di mana pemerintah, pemberi kerja dan serikat pekerja harus menerjemahkan pengakuan itu ke dalam kebijakan yang konkrit untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT.

Arun Kumar

Spesialis Senior untuk Kegiatan Pekerja

berharga kepada masyarakat dan keluarga, mereka masih tidak diakui dan seringkali mengalami eksploitasi, menjalani jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang tidak memadai, upah yang rendah, dan tingginya kemungkinan mereka terpapar penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.

“Rencana aksi yang diberikan para peserta sejalan dengan mandat Konvensi ILO No. 189 dan penting untuk saling bertukar informasi, pengalaman dan pengetahuan dengan menggunakan kerangka komunikasi yang telah kita kembangkan bersama,” ungkapnya.

Lokakarya Regional ini menghadirkan sekitar 30 orang peserta dari Kamboja, Hongkong, India, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pertemuan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Biro Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV) dan Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dengan dukungan dari Proyek ILO untuk Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PROMOTE), didanai Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL). ❖

Perusahaan atasi pe

DUNIA sedang menghadapi krisis pengangguran muda yang makin meningkat, termasuk di Indonesia. Di berbagai sektor perekonomian, kaum muda memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih tinggi menjadi pengangguran dibandingkan dewasa. Bahkan di Indonesia, kaum muda memiliki kemungkinan 4,6 kali lebih tinggi menjadi pengangguran dibandingkan dewasa.

Karenanya, pemagangan yang berkualitas tinggi sangat penting dalam menghadapi persoalan pengangguran muda. Sistem pemagangan yang memadukan pelatihan di tempat kerja serta di luar tempat kerja telah terbukti sukses dalam mendorong pembelajaran dan pembentukan keterampilan. Selain itu juga mampu memfasilitasi kesempatan kerja dengan membangun jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Dari perspektif pengusaha, pemagangan mampu menyediakan pekerja-pekerja muda dengan keterampilan yang diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons persoalan pemagangan dengan terus-menerus meningkatkan kesadaran para anggotanya sehingga sistem yang lebih kokoh dapat ditempatkan untuk semakin mengembangkan keterampilan kaum muda Indonesia.

Apindo baru saja bergabung dalam Jejaring Pemagangan Global (Global Apprenticeship Network/GAN) untuk mendorong sistem pemagangan di kalangan perusahaan. Apindo sejak saat itu terlibat aktif mendorong program pemagangan di tingkat provinsi. Salah satu promosi pun dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Lokakarya mengenai pemagangan dilaksanakan di sana dan dihadiri sekitar 50 peserta yang mewakili berbagai perusahaan dari sektor hotel, otomotif dan retail.

Sumartono, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Solo, mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pemagangan. “Kami telah menerima manfaat positif dari program ini. Hampir 80 persen dari pemagang direkrut oleh perusahaan karena mereka terbukti memiliki keterampilan kerja yang lebih baik.

pengangguran muda melalui program pemagangan

Hal ini membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan pengangguran muda,” ujar Sumartono, saat membuka acara.

Program pemagangan tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah daerah, namun juga untuk pengusaha. FX Sri Martono, Kepala Program Pelatihan Apindo, mengakui bahwa program pemagangan banyak membantu dalam mengatasi ketidaksesuaian keterampilan kerja yang umumnya dihadapi oleh industri.

Kunjungan ke Taman Tekno Solo, balai latihan kerja pemerintah, dan Akademi Teknik Industri (ATNI), mampu menyediakan peluang bagi para peserta untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kurikulum dan kesiapan institusi pendidikan dalam berkerjasama dengan industri.

Selain itu, praktik-praktik yang baik mengenai bagaimana merumuskan silabus pemagangan juga dibagi oleh perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Untuk memastikan efektivitas dari program pemagangan, berdasarkan pengalaman perusahaan, maka diusulkan bahwa silabus dan program pemagangan harus diperbarui dan dievaluasi secara rutin.

Pemagangan selain dapat menjadi kontribusi pengusaha dalam mengurangi pengangguran, juga dapat memberikan manfaat bagi pengusaha dengan menyediakan pekerja yang memiliki keterampilan, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sumartono

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Solo

Lokakarya ditutup dengan komitmen dari Apindo untuk meneruskan upaya mendorong pemagangan di tingkat perusahaan serta melaksanakan sebuah aksi nasional yang bertujuan untuk mendorong perusahaan mengembangkan program pemagangan, khususnya melalui Jejaring Pemagangan Indonesia. ❖





Better Work Indonesia

Sekilas:

Better work Indonesia merupakan bagian dari program global Better Work, yang merupakan kemitraan unik antara ILO dan International Finance Corporation (IFC). Program ini memadukan keahlian ILO dalam standar ketenagakerjaan dengan keahlian IFC dalam pengembangan sektor swasta. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan mendorong daya saing di rantai pasokan global. Better Work berfokus pada solusi yang terukur dan berkelanjutan melalui penguatan kerjasama antar pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta para pembeli internasional. Better Work memadukan penilaian perusahaan secara independen dengan layanan nasihat dan pelatihan (layanan utama) untuk mendukung peningkatan praktis melalui kerjasama di tempat kerja.

Didukung oleh:  **IFC** | **International Finance Corporation**
World Bank Group



 BetterWorkIndo

 Better Work Indonesia

Capaian Tahun 2016:

1. **Pendaftaran 187 Pabrik dengan BWI**, berlokasi di daerah DKI Jakarta sekitarnya, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
2. **BWI telah menjangkau hampir 400.000 pekerja pada 2016**, 80 persen di antaranya adalah perempuan.
3. **Didukung oleh 30 pembeli internasional**. Jumlah dan jenis dukungan dari para internasional terus berkembang. Forum pembeli ke-lima diselenggarakan pada awal September yang diikuti lebih dari 20 pembeli dan penyalur (*vendor*). Forum ini terbuka untuk pembeli dan penyalur sebagai upaya menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan standar ketenagakerjaan dalam rantai pasokan global. Forum tahun ini juga memberikan peluang bagi para peserta untuk berinteraksi dengan pemerintah dan mitra sosial mengenai berbagai permasalahan yang memengaruhi kepatuhan dan hubungan industrial di sektor ini.
4. **Jalinan kerjasama erat dengan para pembeli internasional dalam pelatihan di lapangan**. BWI bekerja sama langsung dengan ASICS dalam memberikan pelatihan bagi para pemasok mereka mengenai hubungan industrial dan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3). GAP juga menjalin kerjasama dengan kami dalam isu K3 yang menyasar para pemasok utama mereka di sini.
5. **Penerbitan Protokol Zero Tolerance dan Pelaporan Publik**. Dua pendekatan utama untuk mempromosikan kepatuhan dan transparansi pada sektor ini diterbitkan. Protokol Zero Tolerance memberikan kerangka kerja formal untuk bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO/BWI dalam menangani pelanggaran serius terhadap hak kerja di tingkat pabrik. Pelaporan publik merupakan publikasi informasi mengenai kepatuhan di tingkat pabrik sesuai dengan berbagai isu yang telah dinilai oleh Better Work, dan dipublikasikan secara terbuka di portal transparansi Better Work. Pelaporan publik di Indonesia akan dimulai pada pertengahan 2017.
6. **Peluncuran Survei Dampak**. Better Work Indonesia merupakan salah satu dari lima program di negara ini

yang secara mandiri dinilai oleh Tufts University mengenai keefektifannya dalam meningkatkan kehidupan para pekerja di sektor garmen dan mendorong daya saing pabrik. Hasil dari pelaporan Kemajuan dan Potensi ini memperlihatkan bahwa Program Better Work memiliki dampak besar dan penting terhadap kondisi kerja. Laporan juga menegaskan bahwa pemantauan kepatuhan penting dilakukan dan dialog sosial berperan dalam meningkatkan kinerja para pekerja.

7. **Pendirian Yayasan Nasional untuk mengambil alih layanan utama kepada pabrik, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan BWI**. Yayasan Kemitraan Kerja dibentuk pada September untuk mengambil alih semua layanan utama terkait dengan pabrik-pabrik BWI. Yayasan ini telah beroperasi sejak Januari 2017. Tim BWI akan melanjutkan dengan ILO dan memastikan konsistensi, kesesuaian dan kualitas layanan pabrik. BWI juga menangani hubungan dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, mitra sosial, pembeli dan donor. Pendirian yayasan menjadi satu momen penting dalam sejarah BWI.
8. **Bekerja sama dan mendukung inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan**. BWI terus bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam membentuk dan secara terus-menerus memperbarui dan menyesuaikan alat serta pendekatannya. Ini termasuk penafsiran dan penegakkan hukum serta pemberian nasihat dan pelatihan bersama. Fokus khusus pada tahun ini adalah mengenai K3 dan pengembangan isu keselamatan. Bantuan teknis dalam bentuk berbagi alat, bahan dan pendekatan juga telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan terhadap inisiatif keahlian norma kerja (KnK) dan Program Kepatuhan Ketenagakerjaan (PROKEP).
9. **Fokus kuat pada kerjasama di tempat kerja dan keterampilan berorganisasi dan kepemimpinan serikat pekerja** melalui penyelenggaraan pelatihan kerjasama di tempat kerja pada semua bidang yang menjadi cakupan BWI. Pelatihan bagi serikat pekerja di tingkat cabang dan pabrik juga dilakukan untuk membangun serikat pekerja yang kuat dan demokratis, mendorong keterlibatan aktif para perempuan pengurus serikat dan mendorong hubungan industrial yang kuat di tingkat pabrik.

Target Tahun 2017:

- Meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi 230 perusahaan.
- Melanjutkan peningkatan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan mendorong daya saing pada rantai pasokan global ke seluruh perusahaan yang terdaftar dalam BWI.
- Melibatkan pemerintah dan mitra sosial demi perubahan yang berkelanjutan di sektor ini.

Kisah Humanis

Memperkuat pengetahuan pekerja dalam mengurangi risiko di pabrik garmen di Indonesia

LEBIH dari 150 perwakilan pabrik di Indonesia bergabung pada seminar pelatihan industri Better Work di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta mengenai manajemen risiko yang efektif pada Forum Better Work Indonesia 2016. Pelatihan ini berfokus pada alat industri dalam menangani berbagai jenis risiko termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, sumber daya manusia dan risiko operasional bisnis.

Jonas Astrup, Spesialis Sistem Produktivitas Better Work, mengatakan bahwa manajemen risiko adalah mengenai pencegahan, melangkah ke depan dan kepemilikan isu. Hal ini pun bermanfaat dari sisi bisnis karena dapat melakukan pengendalian yang membatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan, mogok, perselisihan dan interupsi produksi. "Yang membuat pendekatan kami unik adalah kami menjadikan alat-alat kegiatan yang dapat dengan mudah dijelaskan dan digunakan oleh Komite di manajemen," imbuhnya.

Seminar-seminar ini menyoroti pentingnya dialog sosial dalam membantu pekerja dan perwakilan mereka terlibat dalam identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko. Para pekerja dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga mengenai risiko karena mereka menjalani proses dalam pabrik setiap hari. Karenanya saat pelatihan, pabrik juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan para pekerja, metodologi di balik prioritas risiko dan bagaimana memilih pengendalian dan melaksanakannya.



Gloria Chen, manajer dari PT Dragon Forever, yang merupakan bagian dari RSI Apparel group, memuji alat komunikasi yang digunakan dalam pelatihan. "Sesi mengenai manajemen risiko memberikan masukan tentang bagaimana topik yang sangat berat ini disampaikan ke tim saya dengan cara yang ringan dan sangat berarti," kata Gloria.

Hingga saat ini, seminar industri manajemen risiko telah diselenggarakan di seluruh negara Better Work: Nikaragua, Haiti, Yordania, Vietnam, Kamboja, Bangladesh dan Indonesia. Pada 2016, lebih dari 1.000 perwakilan pabrik telah mengikuti pelatihan ini. Seminar-seminar ini didukung oleh Walt Disney Company's International Labor Standards Group. ❖



Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif (InSIGHT)

Sekilas:

Proyek InSIGHT bertujuan memperkuat dialog kebijakan dan kemampuan kelembagaan dalam mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di industri dan tempat kerja. Proyek ini bertujuan memperkuat struktur tripartit lokal dan sistem pendukungnya, sehingga dapat mempertahankan keberlanjutan dan daya saing baik di tingkat industri maupun tempat kerja.

Dengan dukungan dari Pemerintah Jepang, Proyek InSIGHT bekerja di tingkat regional dan nasional. Kegiatannya akan mencakup kawasan ASEAN termasuk intervensi di tingkat nasional di Indonesia, dan pada akhirnya mereplikasi pengalaman-pengalaman ini di negara-negara Asia lainnya.

Proyek ini merupakan bagian dari Inisiatif Pekerjaan Ramah Lingkungan (Green Jobs) ILO, dan merupakan tambahan portfolio kegiatan Green Jobs dan Usaha Berkelanjutan di Asia Pasifik. Selanjutnya, proyek InSIGHT akan memperluas cakupannya sebelum kerjasama dengan ILO-Jepang di kawasan ini dengan tema hubungan industrial dan tempat kerja yang lebih ramah lingkungan dan aman.

Dengan komitmen global yang baru terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dipadukan dengan konsolidasi ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih besar lagi di kawasan ASEAN, para mitra tripartit ILO melanjutkan keterlibatan mereka dalam wacana, kesepakatan dan aksi di tingkat regional. Untuk itu, proyek ini berupaya berkontribusi dalam memupuk pemahaman mengenai implikasi dan tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi, upaya mencapai kelestarian lingkungan, kebutuhan akan inklusi sosial, dalam konteks kerja layak.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Penyelenggaraan Seminar Tripartit Regional ke- 7 mengenai Hubungan industrial di Chiba, Jepang.** Dihadiri para pemimpin tripartit dari negara-negara ASEAN, seminar ini membahas mengenai kondisi hubungan industrial terkini di tiap-tiap negara dan berbagi praktik-praktik baik untuk mendorong dialog sosial dalam perusahaan.

2. **Penyelenggaraan serangkaian seminar mengenai praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggungjawab, bekerja sama dengan Unit Perusahaan Multinasional dan Pelibatan Usaha ILO Jenewa.** Seminar yang saling berkaitan ini diselenggarakan secara simultan, dihadiri para mitra tripartit, menuju penerapan praktik yang berkelanjutan dan bertanggungjawab serta mengeksplorasi tindakan-tindakan aksi bersama.

- Seminar Perusahaan Multinasional: "Mempromosikan Ketenagakerjaan dan Meningkatkan Keterkaitan Bisnis di Indonesia", berfokus pada memajukan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN) yang tetap relevan hingga saat ini, dalam konteks SDGs 2030.
- Forum Hubungan Industrial: "Jalur Meningkatkan Hubungan Industrial di Indonesia", membahas kemajuan situasi hubungan industrial pada tahun-tahun belakangan ini dan menyoroti pentingnya kerjasama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang lebih harmonis dalam perusahaan. Juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari Pakar Sistem Ketenagakerjaan Jepang dan praktik yang baik dari Filipina dan Vietnam.
- Seminar Perusahaan Multinasional: "Mempromosikan Praktik Usaha yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan di Indonesia: Peran penting rantai hotel global yang beroperasi di Bali dalam mempromosikan ketenagakerjaan muda". Diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Hotel Bali, forum ini mempromosikan pelaksanaan Deklarasi PMN ILO untuk sektor perhotelan di Bali

3. **Penyelenggaraan Konsultasi Tripartit mengenai Pekerjaan Ramah Lingkungan (*green jobs*):** Penilaian Dampak Pasar Kerja berdasarkan Kontribusi yang telah ditentukan di tingkat

Nasional oleh Indonesia (kebijakan perubahan iklim dan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030) yang dilakukan bersama dengan Institute for Global Environment Strategies (IGES) dan ILO Green Jobs. InSIGHT menyelenggarakan dialog dan forum teknis untuk dapat menrefleksikan konteks Indonesia saat ini dan mengembangkan kapasitas para mitra tripartit serta pemangku kepentingan mengenai masalah ini. Proses ini dikembangkan menjadi skenario awal untuk konsultasi mengenai pekerjaan masa depan.

4. **Penerapan Inisiatif Aksi-Pembelajaran Terfokus:** serangkaian seminar dan konsultasi yang diselenggarakan baik untuk pemimpin serikat pekerja maupun anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai tema-tema terkait praktik-praktik di tempat kerja yang berkaitan dengan green jobs dan hubungan industrial.

Target Tahun 2017:

- Menyelenggarakan Seminar Tripartit Regional mengenai Hubungan Industrial.
- Melakukan lokakarya regional bersama mengenai Pendekatan Sektor: Keterampilan untuk Pekerjaan yang Ramah Lingkungan.
- Menyelenggarakan Seminar/Forum Kebijakan Nasional di Indonesia.
- Mendukung pelaksanaan rencana aksi bersama untuk 'Keterampilan bagi Pekerjaan Ramah Lingkungan' melalui lokakarya dan pengembangan modul bersama dengan para mitra tripartit.
- Melakukan lokalisasi dan menyelenggarakan pelatihan "Greener Business-Better Workplace" untuk perusahaan bersama dengan para mitra teknis.
- Mengembangkan model dan dokumentasi pengalaman perusahaan mengenai penggunaan pendekatan peningkatan kapasitas InSIGHT (Bisnis yang lebih ramah lingkungan—paket pelatihan yang lebih baik) serta contoh-contoh lain dari Praktik Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab.
- Menghasilkan pengetahuan dan sumber informasi mengenai tema-tema kunci dalam bidang hubungan industrial, green jobs dan perusahaan yang berkelanjutan sejalan dengan konteks ASEAN.
- Mengumpulkan peserta dan perwakilan dari tingkat regional dan nasional menjadi jaringan advokat tripartit untuk hubungan industrial, green jobs dan perusahaan yang berkelanjutan.
- Berbagi dan mereplikasi pendekatan pelatihan dan perangkat yang digunakan di negara lain (dalam hal ini Vietnam dan Thailand).

Bagaimana perekonomian hijau akan berdampak terhadap ketenagakerjaan di Indonesia?

DUNIA kerja terus mengalami proses perubahan. Terdapat beberapa kekuatan yang mengubahnya, antara lain perkembangan teknologi yang sangat pesat, dampak dan respons terhadap perubahan iklim, hingga berbagai karakter produksi dan kerja yang terus berubah. Untuk memahami dan merespons tantangan-tantangan baru ini secara efektif, ILO pun meluncurkan program “Inisiatif Pekerjaan Masa Depan” (Future of Work Initiative) pada Juni 2015.

Untuk mendukung inisiatif ini, ILO menyelenggarakan diskusi awal bersama para mitra dan konstituen utama dengan tema “Inisiatif Pekerjaan Masa depan: Transformasi yang Mempengaruhi Bursa Kerja di Indonesia”, pada 3 November 2016, di Jakarta. Diskusi ini menjadi bagian dari serangkaian forum yang membahas mengenai masa depan dunia kerja yang diselenggarakan untuk memahami seperti apa saja perspektif dan misi ke depan Indonesia.

Dihadiri sekitar 50 peserta dari perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, rangkaian diskusi pertama ini berfokus pada perekonomian hijau, serta langkah-langkah dan dampak perubahan iklim pada bursa kerja sebagai salah satu dari tiga penggerak utama yang mempengaruhi masa depan dunia kerja. Dua penggerak lainnya adalah teknologi dan globalisasi.

Masukan dan temuan utama mengenai topik ini disajikan. Lorraine Villacorta, Penasihat Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO menekankan bahwa respons-respons yang relevan seperti yang termasuk dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia (disebut sebagai NDC) menjadi salah satu penggerak utama dari perubahan dalam dunia kerja di Indonesia.

Temuan utama mengenai studi terkini untuk mengkaji dampak kebijakan perubahan iklim terhadap bursa kerja Indonesia, termasuk target-target nasional untuk pengurangan emisi sampai tahun 2030, tercerminkan dalam NDC yang disajikan oleh Dr Xin Zhou, seorang peneliti senior untuk Institute for Global Environment Strategies (IGES). Studi ini dilakukan bersama dengan Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO dan ILO Indonesia.

Studi ini menunjukkan bahwa dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan target emisi pada tahun 2020 dan 2030, sektor-sektor utama kemungkinan akan melihat dampak ketenagakerjaan dalam sektor energi, kimia, manufaktur non-logam. Temuan menyoroti penambahan kesempatan kerja bagi sektor energi terbarukan, khususnya energi listrik dari sumber panas bumi dan air.

“Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dari aspek sosial dan ekonomi, apabila dikelola dengan baik, tentu dapat menggerakkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kerja, keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dan kunci dari transisi ini adalah memahami kaitan antara bursa kerja dan kebijakan perekonomian yang ramah lingkungan.”

Lorraine Villacorta

Advisor of ILO Green Jobs Programme

Studi ini juga mencatat dampak ketenagakerjaan positif yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan dan respons bursa kerja yang proaktif, khususnya apabila kebutuhan akan keterampilan dipenuhi. Dengan langkah seperti ini maka memungkinkan untuk melakukan penyerapan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ke sektor-sektor yang berkembang.

Menanggapi temuan-temuan tersebut, Kunjung Masehat, Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, menekankan pentingnya pengembangan dan pelatihan keterampilan bagi semua aktor ketenagakerjaan utama – pemerintah, pekerja dan pengusaha – sebagai upaya untuk memuluskan transisi dan adaptasi terhadap perubahan baru di masa depan.

Dari sudut pandang pengusaha, Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menekankan tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memanfaatkan energi terbarukan. “Energi terbarukan masih mahal dan hal ini akan mempengaruhi produktivitas dan daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata dia.

Sementara Agus R. Toniman, Majelis Dewan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengingatkan bahwa semua perubahan yang terjadi di masa depan harus menjamin kesejahteraan pekerja. “Benar bahwa kita perlu mengantisipasi pengembangan keterampilan. Namun, kita juga perlu mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja dan meminimalkan hilangnya pekerjaan,” ujar dia. ❖

C. Perlindungan sosial untuk semua

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program jaminan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Meningkatkan kerangka kebijakan, kelembagaan dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.





Memperluas Cakupan Jaminan Sosial di ASEAN

Sekilas:

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak semua orang akan jaminan sosial, dan tanggung jawab negara dalam mengembangkan jaminan sosial. Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40/2004) yang progresif dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24/2011) bertujuan memperluas cakupan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat dalam hal kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggalnya pencari nafkah utama.

Kegiatan-kegiatan ILO dalam bidang jaminan sosial pekerja di Indonesia sejalan dengan Konvensi Jaminan Sosial No. 102 Tahun 1952, dan Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial No. 202 Tahun 2012. Karenanya, proyek ILO mengenai "Memperluas Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA)" bertujuan mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang lebih baik dalam memperluas jaminan sosial dan mendorong kerjasama Selatan-Selatan di antara negara-negara anggota ASEAN.

Didanai oleh pemerintah Jepang, Proyek ini juga memberikan dukungan bagi Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Dimulainya proyek ILO/Jepang untuk Memperluas Jaminan Sosial Di ASEAN (ESSA)).** Kegiatan-kegiatan proyek ini di Indonesia bertujuan meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan, penyelenggaraan dan layanan sejalan dengan semakin meningkatnya cakupan jaminan sosial. Sebuah tinjauan terhadap sistem pengawasan jaminan sosial dilakukan bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
2. **Dukungan terhadap Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Agenda Indonesia menuju Pekerjaan Layak untuk Semua.** Konferensi ini menekankan kembali komitmen Indonesia dan menyusun rekomendasi untuk memperluas jaminan sosial bagi semua. Aksi-aksi yang telah ditentukan mencakup: 1) Memperkuat lembaga jaminan sosial; 2) Mencapai cakupan jaminan sosial bagi semua pekerja, termasuk pekerja perekonomian informal dan pekerja migran; 3) Menilai kondisi untuk meluncurkan asuransi pengangguran; dan 4) Meninjau kembali kebijakan dan peraturan mengenai pensiun.
3. **Peningkatan kesadaran dan penyebarluasan informasi mengenai asuransi pengangguran** bagi konstituen tripartit berdasarkan pada standar ILO dan pengalaman internasional.
4. **Peningkatan kapasitas konstituen tripartit mengenai jaminan sosial, kesiapsiagaan bencana, jaminan hari tua dan bertukar pengetahuan** untuk mencapai SDGs mengenai jaminan sosial universal.

Target Tahun 2017:

- Meluncurkan studi aktuarial untuk skema pensiun.
- Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, menyelenggarakan pelatihan regional mengenai perluasan jaminan sosial.
- Meningkatkan peran pengawasan jaminan sosial, belajar dari pengalaman negara lain termasuk sistem Sharoushi di Jepang.
- Melakukan analisis mengenai hambatan dan rekomendasi berbasis bukti untuk memperluas cakupan jaminan sosial, terutama bagi perusahaan skala mikro, kecil dan menengah (UKMK).
- Melakukan analisis biaya manfaat mengenai partisipasi dalam jaminan sosial.

Memperluas cakupan perlindungan sosial di Indonesia

INDONESIA mengambil langkah-langkah menuju perlindungan sosial universal sesuai dengan mandat konstitusi dan standar-standar internasional. Sejak November 2016, lebih dari 170 juta orang telah menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (yang menangani asuransi kesehatan), sementara 19 juta pekerja dan pengusaha menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (menangani masalah kecelakaan kerja, kematian dan tunjangan hari tua).

Memperkuat lembaga jaminan sosial nasional guna mencapai cakupan universal dan menggali berbagai solusi bagi kelompok-kelompok rentan tertentu (pekerja dari perekonomian informal dan pekerja migran) merupakan hal-hal yang menjadi prioritas aksi utama dari para anggota ILO di Indonesia selama Dialog Tingkat Tinggi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadakan di Jakarta pada Agustus 2016. Sebagai tindak lanjut dari Dialog tersebut dan sebagai bagian dari kerangka kerja proyek regional ILO/Jepang mengenai Memperluas Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA), lokakarya berbagi informasi selama dua hari diselenggarakan di Bogor pada September 2016 lalu.

Sedikitnya 40 perwakilan konstituen tripartit ILO (pemerintah, pekerja dan pengusaha) menghadiri lokakarya ini untuk berbagi informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan strategi perluasan saat ini dan apa yang dapat dipelajari dari berbagai inisiatif sebelumnya yang dilakukan Indonesia dan negara-negara lainnya.

Para peserta juga membahas mengenai standar-standar ILO terkait asuransi ketenagakerjaan/pengangguran dan mengenai perbandingan berbagai pilihan rancangan asuransi berdasarkan laporan yang dipersiapkan proyek ILO/Jepang (tahap II) yang memetakan situasi di 14 negara, termasuk Vietnam, Thailand, Republik Korea, Mongolia, Jepang dan Cina.

Konsultasi ini juga menandai dimulainya Proyek ILO/Jepang mengenai Perluasan Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA) di Indonesia. ❖



Mempromosikan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (UNPRPD) – Tahap II

Sekilas:

Pada tahun 2011, enam badan PBB (ILO, WHO, UNDP, OHCHR, UNICEF dan UN DESA) membentuk Kemitraan PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNPRPD)—sebuah dana perwalian multi-donor (MDTF)—untuk mendukung kerjasama antara badan-badan PBB di tingkat negara guna mempromosikan hak dan peluang para penyandang disabilitas. Tujuan dari UNPRPD adalah mengembangkan kapasitas para pemangku kepentingan nasional, khususnya pemerintah dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas guna mendorong penerapan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCPRD) dengan lebih efektif. Salah satu dari negara pelaksana pertama dari UNPRPD adalah Indonesia.

Kendati pemerintah Indonesia semakin menaruh perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya melalui ratifikasi UNCPRD pada November 2011, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran atas hak-hak penyandang disabilitas, serta memperkuat pondasi kelembagaan disabilitas. Oleh karena itu, proyek ini akan memfokuskan diri pada penciptaan lembaga yang berkemampuan dan inklusif, serta mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat pengumpulan data terkait dengan disabilitas. Di Indonesia, proyek ini dilaksanakan bersama-sama oleh ILO, WHO, UNESCO dan UNFPA.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Pembentukan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) pada Desember 2016**, yang diprakarsai lima perusahaan multinasional: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT L'Oréal Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia. Dengan dukungan dari ILO, IBDN bertujuan mendorong komunitas bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif dan kondusif, baik melalui pertukaran informasi dan pengalaman maupun melalui kerjasama kegiatan antara perusahaan dengan berbagai pihak terkait yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
2. **Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif Keenam pada September 2016 di Padang**, bekerja sama dengan UNESCO dan Pemerintah Kota Padang. Pertemuan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan Jejaring Para Walikota untuk Kota yang Inklusif sebagai koalisi yang aktif, digerakkan oleh tujuan, mandiri dan berkesinambungan guna mendorong dan menyebarkan kebijakan yang memajukan hak-hak penyandang disabilitas.
3. **Penerbitan studi disabilitas terbaru mengenai Pemetaan Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesia**, bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Studi ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas.
4. **Pembangunan kapasitas pemerintah kotamadya dan organisasi penyandang disabilitas lokal melalui lokakarya peningkatan kapasitas**. Hasil utama dari lokakarya ini adalah penyusunan rencana aksi mengenai aksesibilitas dan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas.

Target Tahun 2017:

- Melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif Ketujuh.
- Melaksanakan *job profiling* untuk mempermudah perekrutan penyandang disabilitas sebagai dukungan kepada IBDN.
- Mengarusutamakan data disabilitas ke dalam Indeks Pembangunan Manusia Kementerian Ketenagakerjaan.



Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)

promosikan keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja

INDONESIA terus melangkah maju menuju bisnis yang inklusif dengan pembentukan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) pada Desember 2016.

Lima perusahaan menandatangani komitmen dan mendirikan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) di Jakarta pada 16 Desember 2016. Penandatanganan dan pendirian JBDI ini sejalan dengan bulan kesadaran disabilitas di bulan Desember.

Lima perusahaan yang bergabung untuk membentuk JBDI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT L'Oréal Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia. JBDI didirikan bersama dengan para mitra, seperti organisasi penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan, ILO dan BPJS Ketenagakerjaan.

JBDI memiliki misi untuk mendorong komunitas bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif dan kondusif, baik melalui pertukaran informasi dan pengalaman maupun melalui kerjasama kegiatan antara perusahaan dengan berbagai pihak terkait yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Jejaring juga berkomitmen untuk mempersiapkan sektor usaha menuju lingkungan kerja yang lebih inklusif,

Melihat kemajuan yang telah dicapai dalam hal inklusivitas di Indonesia, saya percaya Jejaring ini akan dapat menjadi sebuah wadah untuk berbagi dan belajar antara pemberi kerja untuk membangun sebuah lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan adil. Melalui Jejaring ini, penyandang disabilitas juga dapat menjadi lebih sadar akan kesempatan yang ada bagi mereka untuk mengembangkan karir sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat mereka.

Francesco d'Ovidio

Direktur ILO di Indonesia

mendukung peran aktif penyandang disabilitas agar siap untuk memasuki dunia kerja, melakukan rekrutmen penyandang disabilitas berbasis potensi dengan cara yang setara dan bersahabat dengan keragaman dan mendorong program-program kreatif yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran aktif dan kemandirian dari para penyandang disabilitas.

Mendukung pembentukan JBDI, Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, menghargai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendukung penyerapan dan penempatan pekerja dengan disabilitas di tempat kerja.

"Kementerian ketenagakerjaan sangat mendukung pendirian JBDI. Kami akan terus menyosialisasikan Jejaring ini sebagai cara untuk mendukung perluasan informasi dan berbagi pengalaman terhadap perusahaan-perusahaan di tingkat provinsi dan kota. Banyak perusahaan di daerah belum menyadari isu disabilitas dan inklusivitas di tempat kerja," kata dia.

Dengan penandatanganan dan pendirian JBDI ini, Jejaring ini akan secara otomatis menjadi anggota Jejaring Bisnis dan Disabilitas Global ILO. Jejaring global ini beranggotakan perusahaan multinasional, organisasi pengusaha, jejaring bisnis dan organisasi penyandang disabilitas di negara-negara seperti Cina, Saudi Arabia, Kosta Rika dan Bangladesh. ❖





Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan (PROPEL-Indonesia)

Sekilas:

Proyek ILO-PROPEL Indonesia bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam perlindungan kebijakan dan peraturan perundangan terkait pekerjaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas agar kebijakan dan peraturan perundangan tersebut konsisten dengan standar internasional. Proyek ini mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam pekerjaan dan pelatihan, melalui kerjasama dengan para mitra dalam membangun kapasitas pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Didanai Irish Aid, Proyek PROPEL-Indonesia dimulai pada Juni 2012, sebagai bagian dari Proyek PROPEL global yang telah dilaksanakan di sejumlah negara di kawasan Asia dan Afrika. Proyek ini berakhir pada Maret 2016.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

Capaian Keseluruhan

Meningkatkan kebijakan dan kerangka hukum mengenai disabilitas

1. **Dukungan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan peluang kerja yang sama bagi para penyandang disabilitas.** Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Penempatan dan Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Disabilitas pada Desember 2015, sebagai upaya untuk memberikan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
2. **Bantuan teknis untuk Kota Mojokerto dalam merancang dan mengkaji Undang-Undang Disabilitas mengenai Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.**
3. **Bantuan teknis dan masukan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyandang disabilitas.** Selain itu, PROPEL juga mendukung partisipasi organisasi dari provinsi-provinsi sasaran guna berpartisipasi dalam diskusi mengenai RUU ini bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. **Bantuan teknis kepada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengadakan bursa kerja inklusif.** Selain itu, sertifikasi partisipasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas selama penyelenggaraan bursa kerja inklusif tersebut.

Memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan mengenai disabilitas dan inklusivitas

1. **Pembentukan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) pada Desember 2016,** yang diprakarsai lima perusahaan multinasional: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT L'Oréal Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia.

Dengan dukungan dari ILO, JBDI bertujuan mendorong komunitas bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif dan kondusif, baik melalui pertukaran informasi dan pengalaman maupun melalui kerjasama kegiatan antara perusahaan dengan berbagai pihak terkait yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

2. **Penguatan kapasitas Kementerian Ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.** Pada 2015, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Pelatihan Kesetaraan Disabilitas (DET), berdasarkan pelatihan DET ILO dan strategi non-diskriminasi, bagi para pejabat ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan mempergunakan anggaran pemerintah. Ini merupakan inisiatif baru dan penting yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan pemerintah daerah mengenai disabilitas dan ketenagakerjaan.
3. **Penguatan kapasitas pemangku kepentingan tentang disabilitas:** kementerian lini, serikat pekerja, organisasi pengusaha, universitas dan media massa. Untuk itu, dua pelatihan tentang Kesetaraan Disabilitas diadakan di Jakarta.
4. **Pelaksanaan Survei Awal di 16 Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur** untuk mengetahui akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan keterampilan.
5. **Pembentukan mekanisme penempatan kerja bagi penyandang disabilitas di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT)** untuk memfasilitasi akses pencari kerja dengan disabilitas, badan penyalur tenaga kerja dan perusahaan.
6. **Bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, menyelenggarakan Forum Jejaring untuk Perusahaan mengenai Penempatan Pekerja dengan Disabilitas.** Diselenggarakan melalui Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia, forum ini diperuntukkan bagi pengusaha Indonesia untuk membahas dan berbagi pengalaman dalam memanfaatkan potensi dan talenta penyandang disabilitas.
7. **Menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan dalam menerapkan berbagai kegiatan terkait disabilitas** untuk memberikan peluang kerja yang sama bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan penyandang disabilitas. Salah satu organisasi itu merupakan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Meningkatkan kesadaran dan mendukung advokasi

1. **Bantuan teknis pada sesi-sesi interaktif yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya meningkatkan kesadaran mengenai berbagai kebijakan dan program terkait peluang kerja bagi penyandang disabilitas.** Sesi-sesi interaksi ini diselenggarakan di Bandung, Banjarmasin, Batam dan Banten sebagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran guna mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan tentang kebijakan yang memungkinkan penyandang disabilitas bekerja.
2. **Peningkatan kesadaran media tentang masalah disabilitas diadakan bekerja sama dengan AJI Jakarta, AJI Kupang dan PWI Jawa Timur.** Pelatihan untuk Pelatih diadakan bagi staf majalah DIFFA dan dua pelatihan media bagi perwakilan media diadakan di Surabaya, Jawa Timur dan di Kupang, NTT.
3. **Pengembangan Panduan Peliputan Media mengenai Disabilitas,** bekerja sama dengan majalah DIFFA dan Dewan Pers. Panduan ini diluncurkan pada Desember 2014.
4. **Pelaksanaan Survei Awal Media untuk mengetahui perspektif berbagai media** (TV, koran, majalah, radio, media online) selama 10 tahun terakhir, dalam meliput tentang disabilitas di Indonesia.
5. **Pembuatan dua video diari mengenai disabilitas berjudul "SAMA: Ruang, Peluang dan Perlakuan terhadap Penyandang Disabilitas",** bekerja sama dengan Yayasan Kampung Halaman. Pertama kalinya dilakukan, video-video ini diproduksi sendiri oleh para penyandang disabilitas di Jakarta menampilkan dua hak penting penyandang disabilitas: hak atas pekerjaan dan fasilitas umum yang layak.
6. **Pemberian beasiswa kepada mahasiswa UNIKA Atma Jaya, Jakarta dan UNIKA Widya Mandira, Kupang** yang

melakukan penelitian mengenai isu hukum terkait dengan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.

7. **Melakukan tinjauan aksesibilitas fisik Balai Latihan Kerja di Jawa Timur.** Tinjauan ini dilakukan oleh tim peneliti dari Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Noverber, Surabaya, Jawa Timur
8. **Penerapan lokakarya konsultasi di empat universitas** (Semarang, Surabaya, Bandung dan Kupang) untuk memperkenalkan dan melihat kemungkinan memasukkan isu disabilitas dalam kurikulum Fakultas Hukum. Beasiswa pun diberikan kepada mahasiswa fakultas hukum yang mengadakan penelitian mengenai masalah hukum terkait pekerjaan bagi penyandang disabilitas.



Berikan mereka kesempatan yang sama seperti pekerja lain

SELAMA bertahun-tahun perusahaan dan organisasi mencari keunggulan kompetitif dengan filosofi keberagaman di lingkungan kerja. Salah satunya dengan mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja, dan bukti menunjukkan banyaknya manfaat yang didapat dengan membuka dunia kerja bagi penyandang disabilitas.

Salah satu perusahaan yang telah membuka pintunya bagi para pekerja dengan disabilitas adalah Hotel Shangri-la di Surabaya, Jawa Timur. Sejak tahun 2007, Shangri-la Surabaya telah menerapkan kebijakan perekrutan dan penerimaan pekerja berdasarkan kinerja dan kompetensi, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Fadli Hamzah, 35 tahun, merupakan salah seorang pekerja yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Ia telah bekerja di bidang *engineering* selama dua tahun, memastikan operasional hotel berjalan dengan lancar. "Bagi penyandang disabilitas seperti saya, saya tidak mau menyerah. Kami harus terus mencoba," katanya.

Menggunakan bahasa isyarat, Ernesta juga mengungkapkan bahwa ia merasakan hal yang sama. "Saya suka bekerja di sini, saya merasa sangat termotivasi" katanya. Ia juga tidak mengalami masalah dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-temannya.

Senada dengan dengan Fadli dan Ernesta, bagi Rea Sabita Edy, pekerjaan ini mendorong rasa percaya diri dan motivasinya. Sebagai petugas reservasi restoran, lulusan sekolah kejuruan ini dapat berkomunikasi dengan para pelanggan. Ia ditempatkan sebagai garis depan dalam mendapatkan kepercayaan para pelanggan selama tiga tahun terakhir.

"Saya langsung berhadapan dengan pelanggan ketika mereka ingin menjadi anggota atau mengambil *voucher*," ujar dia, seraya menambahkan, "Selama saya bekerja di sini, tidak pernah ada diskriminasi. Saya bekerja sangat baik dengan rekan yang lain. Kami berbincang dan bahkan berkumpul bersama."

Sebuah lingkungan kerja yang inklusif menjadi motivasi bagi Fadli, Ernesta dan Rea untuk dapat bekerja dengan baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan komitmen perusahaan. Bagi hotel Shangri-la

Perusahaan memandang pekerja dengan disabilitas memiliki potensi yang sama dengan pekerja lainnya dan dapat dipekerjakan pada sektor yang sama dengan orang lain di hotel ini. Mereka memiliki kinerja yang baik, bahkan mungkin lebih.

Renny Herwanto

Manajer Komunikasi Hotel Shangri-la, Surabaya

Surabaya, pekerja dengan disabilitas memiliki potensi yang sama dengan pekerja lainnya. Kegigihan dan keseriusan mereka dalam bekerja juga merupakan aset yang berharga bagi perusahaan untuk mencapai target.

Melihat kontribusi yang besar dari penyandang disabilitas terhadap perusahaan diharapkan perusahaan lain akan juga membuka pintunya lebar-lebar. "Tidak hanya di Hotel Shangri-la, namun kami berharap hotel bintang lima dan industri lain akan terdorong untuk melakukan hal ini. Mari kita berikan peluang yang sama dengan orang lain bagi teman-teman kita penyandang disabilitas," ia menambahkan.

"Ada dampak positif bagi semua orang, untuk membuka pintu mereka bagi penyandang disabilitas. Bagi pekerja, ini membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan bagi pemberi kerja, mereka mendapatkan pekerja yang memiliki produktivitas tinggi. Jadi ini benar-benar merupakan solusi yang sama-sama menguntungkan," demikian Francesco d'Ovidio, Direktur ILO di Indonesia.

Mendapatkan pekerjaan layak merupakan hak semua orang. Sayangnya 22,8 persen penyandang disabilitas di Indonesia masih kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang mereka butuhkan adalah peluang untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sama dengan siapapun. ❖



Program HIV dan AIDS di Tempat Kerja

Sekilas:

Rekomendasi ILO No. 200 tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja yang diadopsi Juni 2010 mengakui pentingnya peranan yang dimainkan perusahaan dalam membatasi penularan dan dampak epidemik HIV. Kantor ILO di Indonesia telah memobilisasi konstituen tripartit untuk menetapkan kebijakan perusahaan tentang HIV dan AIDS yang difokuskan pada tiga hasil berikut: 1) Menghapus diskriminasi kerja terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHA); 2) Melakukan upaya pencegahan dan tes HIV secara sukarela yang dikaitkan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja (K3) formal dan informal; serta 3) Memastikan akses ke layanan, pengobatan dan bantuan bagi pasien HIV melalui tempat kerja.

Program ILO ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang HIV dan AIDS, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004, dan Rencana Strategis Nasional tentang HIV dan AIDS 2010-2014.

Didukung oleh:



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade

Target Tahun 2017:

- Terus memberikan bantuan kepada pemerintah dalam melaksanakan Model Pendanaan Baru dari Global Fund, terutama untuk menjangkau para pekerja pelabuhan.
- Memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan HIV terkait dengan program keselamatan dan kesehatan kerja.
- Membangun kapasitas populasi kunci yang terkena dampak mengenai inklusi keuangan, termasuk mempromosikan pendidikan keuangan bagi mereka.

Capaian Tahun 2016:

1. **Kemitraan dengan Mariana Renata, model Indonesia papan atas, untuk membuat video Kampanye Suara Mereka yang Terpinggirkan** mengenai manfaat program HIV di tempat kerja bagi para pekerja yang rentan.
2. **Dukungan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan dalam Pelatihan untuk Perusahaan untuk Program HIV di Tempat Kerja.**
3. **Bantuan bagi Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Model Pendanaan Baru dari Global Fund, terutama untuk menjangkau para pekerja pelabuhan.**
4. **Bantuan teknis dan dukungan kepada pemerintah kota Jakarta dalam menghidupkan kembali Kelompok Kerja di Tempat Kerja untuk mendukung strategi jalur cepat sehingga**
5. **Dukungan terhadap Penghargaan ASEAN untuk Tempat Kerja yang telah memiliki Program Pencegahan HIV yang baik.** Enam perusahaan swasta dari negara anggota ASEAN menerima penghargaan atas inisiatif mereka dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui program pencegahan dan peningkatan kesadaran mengenai HIV dan AIDS bagi para pekerja mereka.
6. **Dukungan terhadap keterlibatan ODHA dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional, untuk meningkatkan akses dan menghapus hambatan terhadap layanan kesehatan.**
7. **Perluasan Konseling dan Tes HIV guna menjangkau pekerja berisiko tinggi.**

Kampanye Suara Mereka yang Terpinggirkan: Mariana Renata

Kisah Humanis



"NAMA saya Yohana dan saya hidup dengan HIV," Mariana Renata, model terkenal Indonesia, bernarasi. Mariana bergabung bersama dengan para artis dan atlet di seluruh dunia dalam inisiatif ILO bertajuk "Suara Mereka yang Terpinggirkan" (Voice of the Voiceless) untuk menyuarakan kisah orang yang hidup dengan HIV/AIDS yang tidak dapat menceritakan kisah mereka sendiri. Prakarsa ini juga bertujuan untuk mengurangi diskriminasi terkait HIV di tempat kerja dan mempromosikan tes dan konseling sukarela.

Mariana mengisahkan kisah nyata dari Yohana, seorang pekerja perkebunan di Papua, Indonesia dalam bahasa Inggris dan Perancis yang fasih. Dia diagnosa HIV setelah mengikuti tes sukarela yang diselenggarakan perusahaannya. Kebingungan dan khawatir, Yohana merasa ketakutan. Namun, ia beruntung mendapat dukungan dari perusahaan dan menerima layanan pengobatan serta perawatan.

"Kami senang dapat bekerja sama dengan Mariana Renata untuk mengisahkan kisah kehidupan nyata mengenai HIV/AIDS dari Indonesia. Sebagai artis dan model terkenal, kami percaya kisah Yohana ini dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang dihadapi para pekerja yang hidup dengan HIV," kata Gita Lingga, Staf Komunikasi ILO Jakarta.

Keterlibatan Mariana dalam inisiatif ini dilakukan secara sosial dan pro-bono. "Banyak orang yang hidup dengan HIV tidak memiliki akses atas informasi dan pengobatan serta perawatan. Bahkan di banyak negara mereka kehilangan hak mereka atas pekerjaan," ujar Mariana di tengah-tengah pengambilan gambar selama lima jam di Jakarta.

Mariana dikenal untuk perannya dalam film Janji Joni, model untuk sabun Lux dan pemenang penghargaan Artis Pendukung Terfavorit tahun 2005 pada MTV Indonesia Movie Awards. Lebih menfokuskan kariernya pada modeling, kini ia tinggal di kota New York, Amerika Serikat. ❖



Aksi Tripartit untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (Proyek ASEAN Triangle)

Sekilas:

Selama beberapa tahun terakhir, volume dan kompleksitas perpindahan pekerja dari dan di dalam kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan. Tren ini disebabkan beberapa faktor, seperti perubahan demografis, kesenjangan penghasilan, masalah keamanan, jaringan migran yang dibentuk serta transportasi yang lebih baik. Kendati pekerja migran memberi kontribusi besar untuk negara asal maupun tujuan, banyak di antara mereka—terutama yang berstatus tidak tetap—masih menghadapi masalah pelanggaran hak asasi manusia dan hak mereka sebagai pekerja.

Proyek Triangle yang didanai Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada (DFATD) ini bertujuan mengurangi secara signifikan eksploitasi terhadap pekerja migran di kawasan ini melalui peningkatan perlindungan hukum dan migrasi yang aman serta peningkatan perlindungan bagi para pekerja. Proyek ini mempromosikan pendekatan bilateral dan regional untuk mengatasi masalah bersama, membuat regionalisme menjadi lebih efektif, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di ASEAN. Tujuan proyek ini adalah sesuai dengan prioritas strategis Program Kerja Menteri Tenaga Kerja ASEAN (2010-2015).

Proyek ini berakhir pada September 2016

Didukung oleh: **Canada**^{🇨🇦}

Capaian Tahun 2016:

Capaian Keseluruhan

1. **Pertemuan Persiapan Tripartit untuk Forum Pekerja Migran ASEAN ke-9 (9th AFML)** pada September 2016 di Jakarta. AFML merupakan pertemuan tahunan yang mempertemukan perwakilan-perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha serta organisasi masyarakat madani di negara-negara anggota ASEAN guna membahas berbagai permasalahan terkait perlindungan hak-hak pekerja migran di wilayah ASEAN. Untuk tahun 2016, AFML diselenggarakan pada November di Vientiane, Laos dengan tema: "Kehidupan yang Lebih Baik bagi Pekerja Migran ASEAN melalui Penguatan Perlindungan Sosial."
2. **Pertemuan bersama pertama antara Konfederasi Pekerja ASEAN dan Dewan Serikat Pekerja ASEAN.** Pertemuan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, yang bertujuan meningkatkan kerjasama di antara organisasi pekerja dan pengusaha, mengembangkan perangkat dan memberikan panduan kepada serikat pekerja dan organisasi pengusaha di kawasan ASEAN.
3. **Pertemuan Regional Kedua mengenai Perlindungan Pekerja Perikanan Migran: Pertukaran Informasi ASEAN tentang Panduan mengenai Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan'.** Pertemuan regional ini, yang diselenggarakan pada April 2015 di Jakarta, Indonesia, terfokus pada perlindungan para pekerja perikanan migran dan dirancang untuk mendiskusikan, di antaranya, kerjasama lebih lanjut dalam perlindungan nelayan migran dan berbagi kebijakan nasional dan perkembangan legislatif.
4. **Penyelenggaraan Forum ASEAN ke-8 mengenai Pekerja Migran (8th AFML):** Untuk tahun 2015, AFML diselenggarakan di bulan Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tema "Memberdayakan Masyarakat ASEAN melalui Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran".
5. **Integrasi Ekonomi ASEAN dan Migrasi Tenaga Kerja: Tantangan dan Peluang: Kursus ASEAN ke-3:** Kursus pelatihan 2015 merupakan pelatihan ketiga yang diselenggarakan bersama oleh ILO, Center on Migration, Policy and Society (COMPAS) di Universitas Oxford dan Pusat Pelatihan Internasional ILO (ITC).
6. **Seminar Tripartit Menuju Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).** Para pemangku kepentingan terkait di Indonesia dapat membahas isi Konvensi ILO No. 189, mempelajari pengalaman dari negara tetangga di ASEAN, Filipina, serta membahas kemungkinan dan tantangan yang dihadapi untuk meratifikasi konvensi ini.
7. **Peluncuran Pangkalan Data Statistik Migrasi Pekerja Internasional (ILMS) untuk ASEAN,** terdiri dari data statistik tentang migrasi pekerja dari negara-negara ASEAN termasuk dari Indonesia. Pangkalan data ILMS ini ada di ILOSTAT, yaitu portal terkemuka di dunia untuk data statistik mengenai pasar kerja, sebagai sumber informasi yang unik, disediakan secara gratis untuk para pengguna online: www.ilo.org/ilostat.
8. **Perwakilan Tripartit dan LSM Indonesia dalam Forum Migrasi Pekerja ASEAN ke- 7 (AFML ke-7) di Nay Pyi Taw, Myanmar.** Untuk tahun 2014, tema yang dipilih adalah "Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan Tindakan yang Lebih Baik untuk Melindungi dan Mempromosikan Hak-hak Pekerja Migran".
9. **Peningkatan pengetahuan dasar dan saling berbagi informasi mengenai praktik-praktik yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran** di antara para pemangku kepentingan terkait di bawah pimpinan negara-negara anggota ASEAN serta negara-negara yang menjadi tempat tujuan pekerja ASEAN melalui penyelenggaraan lokakarya regional selama dua hari mengenai pekerjaan di sektor perikanan.
10. **Bantuan terhadap pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan partisipasi Indonesia di Forum Pekerja Migran ASEAN ke-6 (6th AFML)** di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Bantuan diberikan dalam bentuk lokakarya untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan Indonesia dari badan pemerintahan, serikat pekerja dan pengusaha serta kelompok masyarakat sipil.
11. **Partisipasi di Forum Pekerja Migran ASEAN ke-6 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.** Untuk tahun 2013, Forum ini memilih tema "Data serta Mekanisme Pengaduan" dengan tajuk: "Memperbaiki Kebijakan dan Perlindungan terhadap Pekerja Migran melalui Berbagi Data dan Akses yang Memadai terhadap Sistem Hukum dan Pengadilan kepada Pekerja Migran selama Masa Kerja, termasuk Mekanisme Pengaduan."



PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak

Sekilas:

Pada Juni 2011, ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang akan memperluas, bagi negara-negara yang meratifikasinya, jangkauan perlindungan bagi jutaan pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang hak-hak dasarnya belum terjamin. Melalui pengadopsian ini, Konferensi Perburuhan Internasional menegaskan: PRT, juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak di atas usia minimum untuk bekerja harus diberi perlindungan khusus saat melakukan pekerjaan domestik. Proyek "PROMOTE" mempromosikan perwujudan Pekerjaan Layak untuk PRT sebagai upaya mengurangi pekerja rumah tangga anak (PRTA).

Proyek PROMOTE bertujuan untuk mengurangi PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi-organisasi PRT agar dapat mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT secara efektif. Proyek ini berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian organisasi PRT untuk mengurangi PRTA serta mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, dengan fokus utama pada Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia dan tempat tinggal bagi jutaan PRT dan PRTA. Efektivitas kegiatan di Indonesia tentunya akan berpengaruh dan berdampak besar pada pengembangan kebijakan di kawasan ini, terutama di ASEAN.

Pada Juli 2014, Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan Proyek PROMOTE telah ditandatangani oleh ILO Jakarta dan Kementerian Tenaga Kerja, dan Rencana Aksi/Rencana Kerja PROMOTE pun telah disetujui Komite Penasihat Proyek pada pertengahan September 2014.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Peningkatan kesadaran mengenai pekerjaan layak bagi PRT dan penghapusan PRTA** melalui berbagai media dan jalur media sosial. Kampanye ini secara aktif dilakukan melalui media sosial di mana Facebook proyek ini telah mendapatkan “like” hingga lebih dari 7,500 pengguna Facebook; sementara twitter mencapai 9,282 pengikut. Selain itu, mitra utama Proyek ini juga aktif bermedia sosial dengan menggunakan 10 akun Facebook dan satu akun Twitter untuk kampanye ini.

2. **Pelibatan guru dalam menangani PRTA dan pengembangan Panduan bagi para guru dalam mencegah dan menghapuskan PRTA.** Bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pelatihan tiga hari bagi para pelatih yang menyasar anggota PGRI dilakukan tentang bagaimana guru/sekolah dapat mencegah PRTA. Pelatih yang sudah terlatih akan melatih guru-guru di tiga kabupaten yang dikenal sebagai daerah pengirim PRT: Lampung Timur di Lampung, Sinjau di Sulawesi Selatan dan Bangkalan di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut, para guru juga menyelenggarakan pertemuan dengan orangtua dan siswa guna meningkatkan kesadaran mereka akan PRTA dan tindakan-tindakan pencegahan untuk mencegah anak-anak bekerja sebagai PRTA.

3. **Pelibatan tokoh agama dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT dan menghapus PRTA.** Bekerja sama dengan JARAK, jaringan LSM nasional yang menangani masalah pekerja anak, lokakarya dengan para pemuka agama diselenggarakan di empat provinsi sasaran DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Dihadiri oleh 152 tokoh agama, lokakarya ini diakhiri dengan pengembangan aksi yang dapat diintegrasikan ke dalam program agama reguler mereka.

4. **Pengujian Sistem Pemantauan berbasis Masyarakat pada 13 komunitas di empat provinsi sasaran.** Bekerja sama dengan JARAK sebagai mitra organisasi untuk ILO-PRMOT, proyek ini telah mengembangkan sistem pemantauan berbasis komunitas berdasarkan Peraturan Menteri No. 2/2015. Berdasarkan peraturan ini, semua PRT harus didaftar oleh pemuka masyarakat (RT/RW). Hasil sistem

yang diujicobakan ini mendapatkan respons yang baik dari para pemangku kepentingan terkait.

5. **Penghargaan Media untuk Pelaporan Terbaik dalam Perlindungan PRT dan Penghapusan PRTA bagi Jurnalis.** Bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, para pemenang dari empat kategori pelaporan (liputan investigatif, liputan mendalam, artikel feature dan foto bercerita) diumumkan pada Desember 2016. Penghargaan media ini bertujuan untuk mengapresiasi karya jurnalis dalam menghasilkan produk-produk jurnalisme bermutu, yang mampu menggambarkan berbagai persoalan PRT dan PRTA.

6. **Pengujian pelatihan keterampilan bagi PRT.** Bekerja sama dengan JARAK dan anggotanya di Malang (LPKP), pelatihan keterampilan bagi PRT diujicoba di Malang, Jawa Timur. Pelatihan keterampilan dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Pekerjaan di tingkat Nasional tahun 2015. Pelatihan ini terdiri dari 200 jam belajar yang mencakup tata laksana rumah tangga, memasak untuk keluarga, mencuci pakaian dan kompetensi dasar pengembangan diri. Diikuti 90 PRT dan mereka yang ingin menjadi PRT, pelatihan ini diujicobakan dengan menggunakan program pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis pusat pelatihan. Dari 90 peserta, 74 mengikuti dan mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

7. **Bantuan hukum bagi PRT dan PRTA yang sedang menghadapi kasus hukum,** bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan PRT (JALA PRT) dan para anggotanya. Hingga saat ini, bantuan hukum telah diberikan kepada 29 kasus dan Panduan Pelatihan bagi Paralegal untuk Membantu PRT/PRTA Menangani Kasus Mereka telah dikembangkan. Selain itu, lokakarya-lokakarya dengan para penegak hukum telah diadakan untuk membahas kerangka dan prosedur hukum dalam menangani kasus PRT dan PRTA. Sejumlah *hotline* di provinsi-provinsi sasaran pun telah dilatih agar semakin meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan kepada PRT dan PRTA yang sedang menghadapi kasus hukum.

8. **Ribuan PRT di empat provinsi sasaran telah terjangkau dan sekitar 1.000 di antaranya mendapatkan manfaat dari berbagai sesi pendidikan** mengenai pekerjaan layak untuk PRT melalui sekolah-sekolah PRT dan kegiatan pengorganisasian.

Meningkatkan standar

Target Tahun 2017:

- Mendukung para mitra dalam memfasilitasi pengembangan koperasi bagi PRT.
- Melakukan analisis kesenjangan pada hukum yang melindungi PRT di Indonesia.
- Melakukan Dialog Sosial mengenai Perlindungan bagi PRT dan Penghapusan PRTA.
- Memperluas sistem pemantauan berbasis masyarakat bagi PRT dan PRTA.
- Melanjutkan sesi pendidikan bagi PRT dan memperkuat komunitas dalam memberikan sesi pendidikan bagi para PRT.
- Melanjutkan sesi pendidikan di sekolah-sekolah PRT dan menyelenggarakan kegiatan di empat daerah sasaran, yang memberikan manfaat bagi 1.500 PRT.
- Mendukung pelaksanaan rencana advokasi nasional dan provinsi untuk menghapus PRTA dan melindungi PRT.
- Melakukan penilaian mengenai kesehatan dan risiko kesehatan pada pekerjaan rumah tangga.
- Mengembangkan kurikulum pelatihan bagi polisi mengenai kerangka hukum yang terkait dengan penghapusan pekerja anak dalam pekerjaan rumah tangga dan eksploitasi PRT, termasuk manajemen kasus yang peka gender dan anak serta teknik-teknik investigasi



KETIKA mengetahui ia lulus ujian sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Misni seorang pekerja rumah tangga (PRT) dari Pandanwangi, Jawa Timur, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Setelah lebih dari 14 tahun bekerja sebagai PRT, ia tidak pernah bermimpi akan mendapatkan sertifikasi atas kompetensinya melakukan pekerjaan rumah tangga.

Asminingsih, seorang PRT dari Balarjosari, Jawa Timur juga sama gembiranya dengan Misni ketika mengetahui ia lulus ujian sertifikasi. Ia bahkan tidak pernah tahu bahwa pekerjaannya sebagai PRT dapat disertifikasi seperti halnya profesi lain.

“Saya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dengan cara yang saya tahu. Setelah mengikuti pelatihan keterampilan, saya sekarang lebih tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah tangga dengan lebih profesional. Kini saya bisa memasak, menyeterika dan membersihkan rumah dengan lebih baik,” ujar Misni; sementara Asminingsih mengatakan “Saya sekarang bisa membersihkan, memasak dan mencuci dengan lebih baik dan saya bahkan bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan majikan saya.”

Misni dan Asminingsih merupakan dua dari 90 peserta program pelatihan keterampilan bagi PRT di Malang, Jawa Timur. Program ini meliputi 200 jam pembelajaran wajib, yang mencakup tata laksana rumah tangga, memasak, mencuci dan kompetensi dasar pengembangan diri. Dari semua peserta sekitar 74 berpartisipasi dalam dan lulus ujian sertifikasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, program pelatihan keterampilan ini diujicobakan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan berbasis pusat belajar mengharuskan para peserta mengikuti sesi pelatihan dan berada di pusat pendidikan untuk dapat memenuhi jam belajar wajib; sementara pada pendekatan berbasis komunitas, sesi pembelajaran disampaikan di tengah masyarakat setiap akhir pekan ketika para PRT dapat mengikuti pelatihan.

Program Pelatihan ini memberikan pelatihan berkualitas tinggi dengan mempergunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk PRT yang dikembangkan berdasarkan SKKNI pemerintah Indonesia untuk Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga pada 2015. Sejumlah elemen dalam Model Standar Kompetensi Regional ILO pun telah dipergunakan di dalam SKKNI tahun 2015.

dan kualitas kerja PRT



Program pelatihan ini merupakan bagian dari upaya ILO untuk meningkatkan kualitas dan standar kerja PRT melalui proyek Mempromosikan Pekerjaan Layak untuk PRT (PROMOTE). Didanai Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL), Proyek PROMOTE bertujuan mengurangi PRTA secara signifikan melalui pembangunan kapasitas para mitra untuk mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT secara efektif.

“Pengembangan keterampilan dan pengakuan profesi PRT memainkan peran penting dalam mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT. Pelatihan keterampilan dan sertifikasi berdasarkan standar kompetensi nasional dapat membantu meningkatkan status PRT sebagai profesi yang diakui. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan kerja PRT dan prospek mereka atas pekerjaan yang lebih baik,” kata Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO-PROMOTE.

“Saya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dengan cara yang saya tahu. Setelah mengikuti pelatihan keterampilan, saya sekarang lebih tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah tangga dengan lebih profesional. Kini saya bisa memasak, menyeterika dan membersihkan rumah dengan lebih baik.

Misni, pekerja rumah tangga

Inisiatif ini merupakan langkah awal pengakuan keterampilan PRT sebagai profesi, yang terfokus pada peningkatan dan sertifikasi keterampilan pekerja rumah tangga dalam tata laksana rumah tangga (termasuk mencuci) dan memasak untuk keluarga. Kurikulum untuk kedua program pelatihan ini telah disusun oleh Proyek ILO-PROMOTE. Kurikulum ini akan diujicoba saat pelatihan untuk diperbaiki dan difinalisasi berdasarkan pengalaman dan masukan para peserta selama sesi pelatihan.

“Setelah mengikuti pelatihan, saya sekarang lebih percaya diri. Saya berharap pelatihan ini dapat mengubah persepsi negatif tentang PRT karena pekerjaan kami seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, berupah rendah dan hanya untuk mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Kini saya sadar bahwa saya bisa melakukan tugas merawat rumah, mencuci dan memasak secara lebih profesional,” kata Widi Astutik, seorang PRT dari Singosari. Ia menambahkan bahwa majikannya kini khawatir ia akan berpindah ke majikan lain.

Pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang sangat penting bagi banyak perekonomian di seluruh dunia, namun masih belum diakui sebagai “pekerjaan” dan menjadi bentuk pekerjaan yang tidak terlihat di banyak negara. PRT juga dipandang sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan karena dianggap sebagai pekerjaan alami bagi perempuan di rumah.

Akibatnya, banyak PRT memiliki kondisi kerja yang sangat buruk, tidak digaji dengan layak, tidak mendapatkan jaminan sosial, bekerja dengan jam kerja yang panjang, dalam kondisi sulit serta tidak selalu aman. Beberapa bahkan rentan mengalami perdagangan manusia, penyalahgunaan seksual, fisik dan psikologi. ❖



Tema lintas sektor

Kesetaraan gender, tripatisme dan dialog sosial serta standar-standar ketenagakerjaan internasional diurusutamakan melalui prioritas-prioritas DWCP.



Program Gender, Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Sekilas:

Sebagai suatu upaya untuk melaksanakan Konvensi ILO No. 100 dan 111, Kementerian Ketenagakerjaan telah secara aktif melakukan kegiatan advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten dengan mendirikan Gugus Tugas Kesetaraan Kesempatan Kerja. Gugus tugas di tingkat provinsi ini diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kesetaraan peluang kerja dan membangun kesadaran para pekerja dan pemberi kerja mengenai pelaksanaan non-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja.

ILO Jakarta terus mendukung Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengadvokasi pembentukan Gugus Tugas ini baik di tingkat nasional maupun provinsi. Melalui Surat Edaran Menteri No. 184 Tahun 2013, Kementerian Ketenagakerjaan telah merevitalisasi Gugus Tugas ini di tingkat nasional dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Gugus Tugas serupa.

Didukung oleh:



Capaian Tahun 2016:

1. **Pemberian saran dan masukan terhadap operasionalisasi Gugus Tugas Kesetaraan dan Kesempatan Kerja di tingkat nasional** dan mendukung pengembangan kapasitas konstituen tripartit di tingkat provinsi.
2. **Dukungan terhadap pembentukan delapan Gugus Tugas oleh Kementerian Ketenagakerjaan** baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Target Tahun 2017:

- Melanjutkan dukungan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam mempromosikan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan untuk dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah dan kesepakatan kerja bersama.

Publikasi



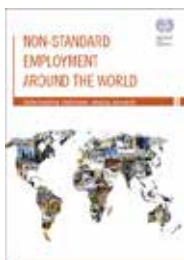
Buku saku kumpulan peraturan-peraturan dan referensi-referensi tentang pekerja rumah tangga

Buku saku ini berisi Undang-undang, Konvensi ILO, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, infografis dan referensi-referensi berguna tentang pekerja rumah tangga.



Upaya pencegahan dan penghapusan pekerja rumah tangga anak (PRTA) di sekolah: Pedoman untuk pendidik

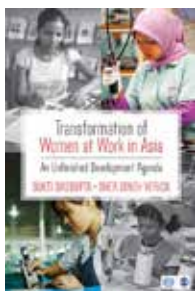
Pedoman ini menekankan pentingnya peran guru dan pendidik dalam pencegahan dan penghapusan PRTA di sekolah. Penting bagi pendidik untuk memahami isu PRTA sehingga mereka dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada anak-anak dan orangtua mereka guna mencegah anak-anak putus sekolah dan bekerja menjadi pekerja rumah tangga.



Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects*

ISBN: 978-92-2-130385

Laporan ini menganalisis insiden-insiden dan tren-tren bentuk-bentuk non standar kerja secara global dan menggali alasan-alasan di belakang fenomena ini, termasuk perubahan dalam dunia kerja yang diakibatkan globalisasi dan perubahan sosial.



Transformation of women at work in Asia: An unfinished development agenda*

ISBN: 978-92-2-1310020

Buku ini mengkaji pendorong, dan hambatan, dalam partisipasi perempuan di pasar kerja Asia dari sudut pembangunan sosio-ekonomi dan transformasi struktural. Berdasarkan kajian komparatif dan kerja lapangan yang luas, buku ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi kaum perempuan di kawasan Asia dalam mendapatkan akses yang lebih besar dan lebih baik terhadap pekerjaan. Temuan-temuan memperlihatkan bahwa perempuan di kawasan ini berkontribusi besar dalam pertumbuhan.



Edisi Khusus ILO Jakarta mengenai Inklusivitas Disabilitas di Tempat Kerja

Edisi khusus ini menampilkan strategi, program dan dampak kunci dari Proyek ILO mengenai Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan (PROPEL-Indonesia) sepanjang tiga tahun pelaksanaannya dari tahun 2012 hingga 2016. Didanai Program Kemitraan Irish Aid, the PROPEL-Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menangani hambatan terhadap peluang kerja yang sama dan mempromosikan inklusi disabilitas.



Financing social protection through contributions and the removal of fuel subsidy: Indonesia*

Indonesia telah memprioritaskan ulang pengeluarannya dengan memotong subsidi bahan bakar dan mengelola resistensi politiknya secara baik dengan menempatkan skema kompensasi yang membantu keluarga berpendapatan rendah, sementara di saat yang sama juga berupaya memperluas jangkauan perlindungan sosial dengan mendukung penciptaan sistem jaminan kesehatan universal dan memperluas jaminan pensiun.



Tinjauan pasar kerja Indonesia Agustus 2016

Indonesia saat ini sedang berupaya menghadapi penurunan harga komoditas di tingkat global dan menyikapi perlambatan ekonomi yang dihadapi para mitra dagang utamanya. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi prediksi pertumbuhan — mengurangi kemungkinan mencapai pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun pada 2018 — dengan berbagai konsekuensi buruk terhadap pasar kerja.



Lemahnya kepatuhan terhadap upah minimum di industri garmen Asia

Upah minimum dapat menjadi bagian dari perangkat kebijakan yang memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka. Namun, upah minimum tidak dapat menjalankan peran ini bila ketidakpatuhan meluas. Catatan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di sektor garmen, alas kaki dan tekstil di tujuh negara pengeksport pakaian di Asia dibayar di bawah upah minimum.



Mobilisasi sektor swasta untuk pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV di daerah prevalensi tinggi Papua dan Papua Barat

Informasi singkat mengenai bantuan teknis ILO yang didanai Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, kepada Dinas-dinas Tenaga Kerja di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam kebijakan nasional dan provinsi mengenai HIV di tempat kerja.



Study on discrimination at work on the basis of sexual orientation and gender identity in Indonesia* **ISBN: 978-92-2-1310402**

Laporan ini mengidentifikasi baik praktik-praktik yang baik maupun berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi orang-orang LGBT di tempat kerja, dan memaparkan bagaimana ILO dapat bekerja dengan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja untuk mempromosikan hak, keberagaman dan toleransi di dunia kerja.



Report of the Business Forum: Inclusive Employment Makes Business Sense* **ISBN: 978-92-2-1310778**

Laporan ini mencakup Kasus Bisnis untuk Pekerjaan Inklusif: Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Semua, sebuah forum bisnis yang diselenggarakan ILO di Jakarta pada Maret 2016. Dibandingkan hanya melakukan program belas kasihan (seperti dalam bentuk CSR), forum ini menekankan pentingnya mengintegrasikan inklusi disabilitas di tempat kerja dengan strategi penciptaan nilai perusahaan.



Assessing the gender gap pay in Asia's garment sector*

Makalah kerja ini memaparkan kesenjangan upah berdasarkan gender di industri garmen, tekstil dan alas kaki di Sembilan negara berkembang Asia – Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Republik Demoraktis Laos, Pakistan, Filipina, Thailand dan Vietnam.



Panduan pekerja migran: Buku saku

Buku saku ini dibuat sebagai panduan untuk pekerja migran juga untuk fasilitator lapangan (organizer) tenaga kerja migran. Diharapkan dengan buku ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme migrasi yang aman agar terhindar dari praktik-praktik perdagangan orang.



Rights@Work 4 Youth: Decent work for young people (rev. 2015)*

ISBN: 978-92-2-1310167

Tujuan dari paket pembelajaran ini adalah mendukung serikat pekerja, layanan ketenagakerjaan dan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta organisasi kaum muda, dalam menjalankan prakarsa yang bertujuan meningkatkan kesadaran kaum muda mengenai hak mereka di tempat kerja. Paket ini terdiri dari panduan bagi fasilitator dan perangkat yang memberikan contoh-contoh langsung praktik-praktik rekrutmen dan situasi tempat kerja.



Program ILO di Indonesia: Capaian 2015

ISBN: 978-92-2-1310372

Publikasi ini menyajikan capaian-capaian kegiatan ILO di Indonesia pada 2015. Hasil-hasil pada 2015 berdasarkan kemitraan dengan para konstituen kami, Pemerintah Indonesia, organisasi pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai perwakilan pengusaha.

Untuk mengunduh versi elektronik dari publikasi-publikasi ini, kunjungi Situs ILO Jakarta:: www.ilo.org/jakarta

*Hanya tersedia dalam Bahasa Inggris

Kegiatan Utama

- Lokakarya mengenai Pengkajian Kurikulum/Silabus Pelatihan dan Modul mengenai Tata Laksana Rumah Tangga, Mencuci dan Memasak bagi Pekerja Rumah Tangga, Jakarta, 12 Januari
- Mobilisasi Sektor Swasta untuk Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan HIV di Dearah-daerah Prevalensi Tinggi Papua dan Papua Barat, Jayapura, 18-21 Januari
- Konferensi mengenai Agenda Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Pekerjaan Layak untuk Semua, Jakarta, 17-18 Februari
- Lapangan Kerja yang Inklusif: Mewujudkan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Semua, Jakarta, 22 Maret
- Peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2016: Menanggulangi Pekerja Anak dalam Rantai Pasokan, Jakarta, 8 Juni
- Mempromosikan Pengorganisasian, Perundingan Bersama dan Pekerjaan Layak di Industri Garmen, Bogor, 29-30 Juni
- Pengorganisasian dan Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak, Bali, 4-6 Agustus
- Dialog Tingkat Tinggi mengenai Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial, Jakarta, 25-26 Agustus
- Forum Bisnis Better Work Indonesia 2016, Jakarta, 6-7 September
- Pelatihan untuk Pelatih mengenai Perundingan Bersama Berbasis Bukti, Bogor, 4-11 September
- Diskusi Interaktif mengenai Tinjauan Pasar Kerja Indonesia, Jakarta, 15 September

	Memperluas Cakupan Perlindungan Sosial di Indonesia, Bogor, 26-27 September
	Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Ke-6 untuk Kota-kota Inklusif, Padang, 27 September
	Pertemuan Nasional Persiapan Tripartit untuk Forum Migrasi Kerja ASEAN Ke-9, Jakarta, 29 September
	Peluncuran Pelatihan Keterampilan mengenai Tata Kelola Rumah Tangga dan Memasak, Malang, 4 October
	Pelatihan bagi Pengawas Ketenagakerjaan mengenai Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, Bogor, 25-27 Oktober
	Masa Depan adalah Milikmu: Menjembatani Kesenjangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia, Jakarta, 29 Oktober
	Kajian Implikasi Pasar Kerja dan Pembangunan Kapasitas untuk Penerapan yang Efektif dan Inklusif Kontribusi Nasional Indonesia, Jakarta, 1-4 November
	Mempromosikan Ketenagakerjaan dan Meningkatkan Keterkaitan Bisnis di Indonesia, Jakarta, 15 November
	Praktik-praktik Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab dalam Perusahaan: Meningkatkan Hubungan Industrial di Indonesia, Jakarta, 16 November
	Mempromosikan Praktik-praktik Bisnis yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab di Indonesia: Peran Rantai Hotel Global di Bali dalam Mempromosikan Ketenagakerjaan Muda, Bali, 18 November
	Berbagi Pengetahuan dan Lokakarya Penutupan: Proyek ILO mengenai Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur, Jakarta, 23 November
	Penghargaan Media ILO-AJI Jakarta mengenai Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak, Jakarta, 23 November
	Pertemuan Regional Asia dan Pasifik ILO ke-16, Bali, 6-9 Desember
	Seminar mengenai Mencapai Hasil Maksimal: Keuangan Inklusif dan Manajemen Kinerja Sosial, Jakarta, 14 Desember
	Peluncuran Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI), Jakarta, 16 Desember
	Peringatan hari Migran Internasional bertajuk "Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi Pekerja Migran Indonesia", Jakarta, 16-19 Desember